



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, sebagai Provinsi Kepulauan maka diperlukan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 akan memuat beberapa strategi serta indikator program kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan menjadi landasan serta pedoman operasional bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pernyataan Visi dan Misi dinas serta bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RENSTRA ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyusunan

RENSTRA ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Pangkalpinang, Nopember 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Ir. SARJULIANTO, Dipl, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19580710 198603 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Bab I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	BAB I. 1
1.2	Dasar Hukum Penyusun	BAB I. 6
1.3	Maksud dan Tujuan	BAB I. 11
1.4	Hubungan Antar Dokumen	BAB I. 12
1.5	Sistematika Dokumen Renstra	BAB I. 15
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II. 1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	BAB II. 40
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II. 45
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II. 48
Bab III	Isu- isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	BAB III. 1
3.2	Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	BAB III. 6
3.3	Telaahan renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota	BAB III. 10
3.4	Telaahan RTRW Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	BAB III. 12
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	BAB III. 14
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
4.1	Visi dan Misi	BAB IV. 1
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka	BAB IV. 4

	Menengah Perangkat Daerah		
4.3	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	BAB IV.	7
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	BAB V.	1
Bab VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	BAB VI.	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	BAB I.	6
Gambar I.2.	Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	BAB I.	14
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	BAB II.	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Bidang Sekretariat	BAB II.	41
Tabel 2.2.	Bidang Perhubungan Darat	BAB II.	41
Tabel 2.3.	Bidang Perhubungan Laut	BAB II.	42
Tabel 2.4.	Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan	BAB II.	42
Tabel 2.5.	Asset Dinas Perhubungan	BAB II.	43
Tabel 2.6.	KIB Dinas Perhubungan	BAB II.	44
Tabel 2.7.	Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan		45
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB II.	46
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB II.	47
Tabel 2.10.	Analisis SWOT	BAB II.	48

Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB III.	5
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BAB III.	9
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	BAB III.	11
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	BAB III.	13
Tabel 4.1.	Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya	BAB IV.	8
Tabel 4.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB IV.	6
Tabel 4.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB IV.	7
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	BAB V.	1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BAB VI.	2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	BAB VII.	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah bagian dari proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu proses perencanaan strategis organisasi untuk menentukan strategi, arah dan tujuan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam rangka mencapai strategi dimaksud.

Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dari Visi dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Perangkat Daerah (PD), yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dapat berupa program PD, program lintas PD, atau program kewilayahan. Program PD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) PD. Program lintas PD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya. Program kewilayahan PD merupakan satu atau

lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Perkembangan demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi perhatian penting pada tahun 2015 jumlah penduduk 1.372.813 orang, dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2015 sebesar 2,19 persen, dengan demikian pertumbuhan penduduk dapat dihitung setiap tahunnya ada penambahan penduduk $\pm$ 30.000 orang setiap tahunnya, secara tidak langsung akan mempengaruhi kebutuhan akan transportasi dimasa yang akan datang, dan hal tersebut harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi sudah selayaknya menjadi salah satu pendorong dan penggerak dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau lainnya yang berjumlah 950 pulau, 470 pulau yang sudah memiliki nama, dari 470 pulau tersebut 50 pulau diantaranya adalah pulau-pulau berpenghuni, dengan kondisi tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menghubungkan antar pulau-pulau tersebut melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang

memadai, murah, terjangkau, aman dan selamat serta terintegrasi dengan moda transportasi lain.

Pembangunan sarana dan prasana transportasi dengan memanfaatkan dana publik harus dapat memberikan jaminan bahwa pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu perencanaan yang memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya, kebijakan transportasi yang tepat sasaran, sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan konsisten dengan pembangunan ekonomi yang dijalankan. Atas dasar pemikiran tersebut perlu disusun suatu rencana strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sampai tahun 2017.

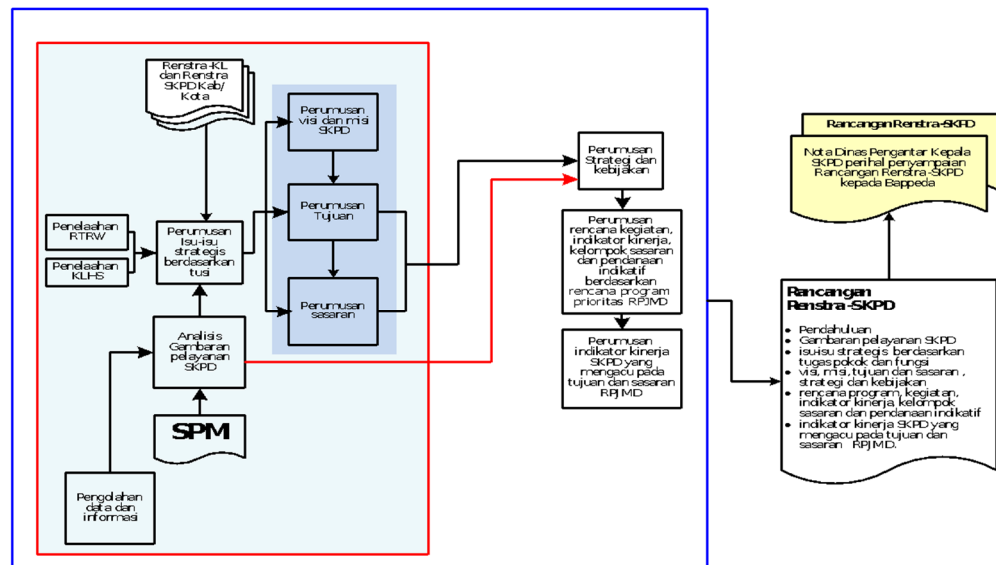
Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan memuat Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan serta Prioritas Pembangunan sektor Perhubungan baik Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut maupun Perhubungan Udara yang dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan dengan arah serta kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mencakup :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan PD
3. Review Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD Kabupaten/Kota
4. Penelaahan RTRW provinsi
5. Analisis terhadap Dokumen KLHS
6. Perumusan isu-isu strategis
7. Perumusan visi dan misi PD
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD provinsi
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD provinsi;
10. Mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra PD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD provinsi;
11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi PD provinsi;
12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
13. Perumusan indikator kinerja PD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi; dan
14. Pelaksanaan forum PD provinsi.

Tahapan penyusunan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas diharapkan Rencana Strategis menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Perhubungan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis PD Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan bidang perhubungan yang disusun untuk memberi arah dan acuan bagi SKPD Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di sektor perhubungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Tersedianya Renstra yang memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dari Visi dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penguatan stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kinerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan berpedoman pada RPJMD Provinsi yang memperhatikan RPJMN. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan serta Prioritas Pembangunan sektor Perhubungan baik Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut maupun Perhubungan Udara yang dijabarkan dalam Rencana Kerja PD Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada RKPD dengan arah serta kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD dan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN kemudian diselaraskan melalui mekanisme Musrenbang.

Rencana Strategis PD Dinas Perhubungan dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2014-2019 yang diaktualisasikan dalam bentuk sinergi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pembangunan sektor perhubungan secara terpadu, berkesinambungan dan tepat sasaran.

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja PD, sebagai berikut :

1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD adalah RPJM Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. RPJM Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sekaligus menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun digunakan dalam menyusun Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
3. Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah sebagai bahan review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, yang mencakup:
 - a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;

- Gambar 1.2.

The diagram illustrates the Performance Management Cycle (PMK) as a continuous process. It begins with the **RPJM** (Regional Medium-Term Development Plan) at the top, which leads to the **Rencana Strategis** (Strategic Plan). This is followed by the **Rencana Kinerja Tahunan** (Annual Performance Plan), which then leads to the **Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement)**. The next step is **Kinerja Aktual** (Actual Performance). Finally, the cycle concludes with the **Laporan Pertanggungjawaban Keuangan** (Financial Accountability Report). A **LAKIP** (Annual Performance Report) is also shown, which is a key output of the cycle. A **Performance Feedback** loop is indicated by a curved arrow on the left, connecting the **LAKIP** back to the **Rencana Kinerja Tahunan** stage. Additionally, a **Rencana Kerja & Anggaran (RKA)** (Annual Work Plan and Budget) is shown as a supporting document for the **Penetapan Kinerja** stage.

Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022

5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada RKPD dengan arah serta kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD dan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN kemudian diselaraskan melalui mekanisme Musrenbang.

Rencana Strategis PD Dinas Perhubungan dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2014-2019 yang diaktualisasikan dalam bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pembangunan sektor perhubungan secara terpadu, berkesinambungan dan tepat sasaran.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA PD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan pengertian tentang Renstra PD secara ringkas, Dasar Hukum Penyusunan Renstra PD, Proses Penyusunan Renstra PD, Hubungan Renstra dengan Dokumen perencanaan daerah lainnya, Sistematika Penyusunan serta Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra SKPD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini diidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra PD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi faktor-faktor pelayanan PD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi Visi dan Misi PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, serta strategi dan Kebijakan

yang akan ditempuh PD.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi penjelasan indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

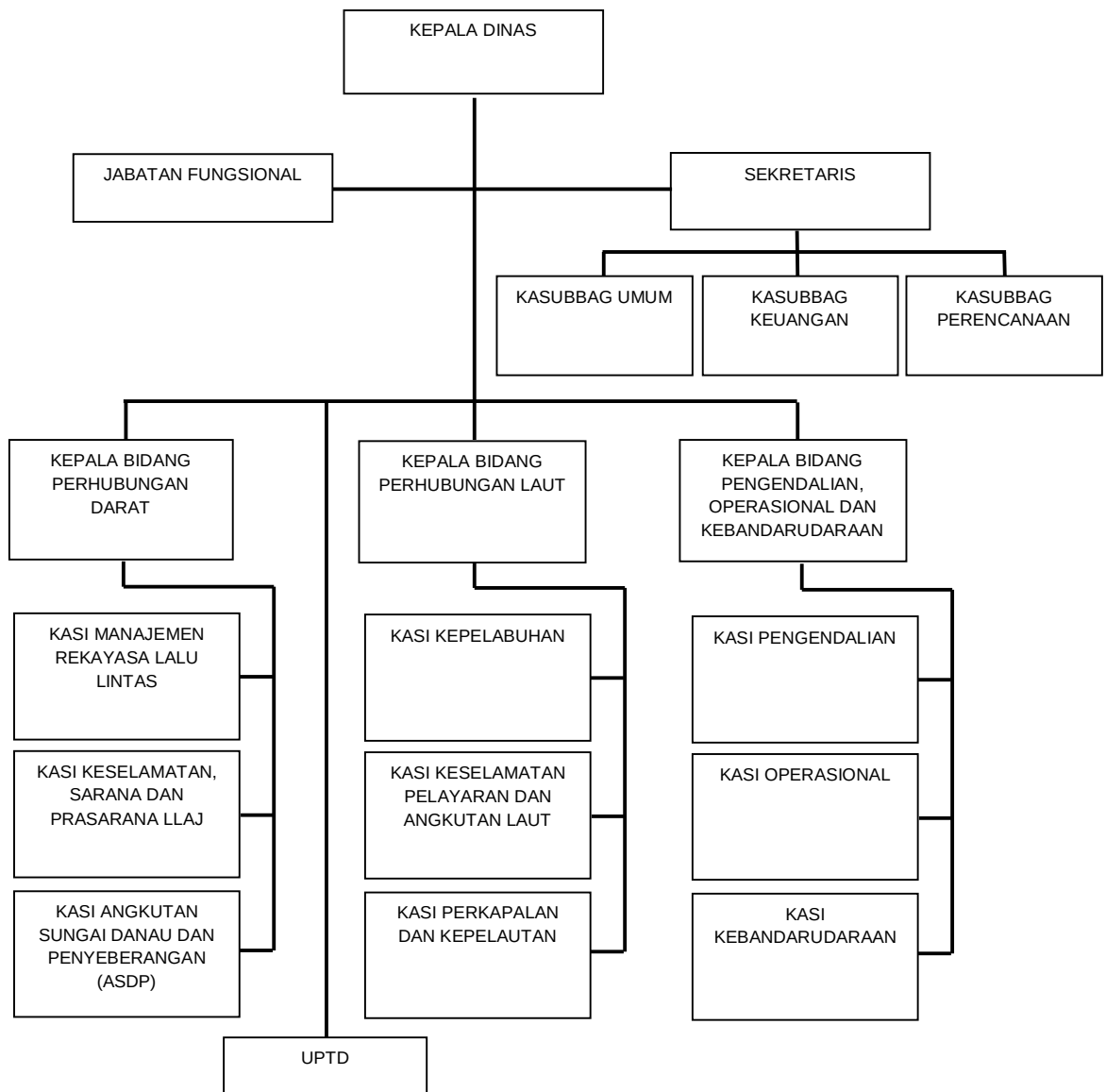
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah provinsi kepulauan bangka belitung, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
2. Dalam Melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Dari Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dijabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh

atasan.

Uraian tugas Kepala Dinas Perhubungan meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perhubungan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan meliputi bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, bidang pengendalian, operasional dan kebandarudaraan dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan;
- f. menyelenggarakan bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, bidang pengendalian, operasional dan kebandarudaraan, serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Perhubungan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan

- pengadministrasian Dinas Perhubungan;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Perhubungan;
 - k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perhubungan;
 - l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang perhubungan;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan;
 - n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - p. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perhubungan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Perhubungan mengoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian

- penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Perhubungan;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset,

- kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perhubungan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Perhubungan serta UPTD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perhubungan;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Perhubungan;
 - j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perhubungan;
 - k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
 - l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - m. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
 - n. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - o. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan;
- 2) Subbagian Umum;
- 3) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan.

1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perhubungan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas subbagian perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja subbagian perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Perhubungan serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Perhubungan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perhubungan;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan serta UPTD;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perhubungan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil

Negara; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perhubungan;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di

lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas subbagian keuangan meliputi:

- a. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- e. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana kegiatan di bidang perhubungan darat dengan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana keselamatan dan teknik sarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis perhubungan darat;
- c. penyelenggaraan pemanduan jaringan pelayanan

- angkutan darat yang wilayah operasinya melayani angkutan antar kota dalam Provinsi, dan angkutan pariwisata;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian penyiapan prasarana dan sarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;
 - e. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan pelayanan angkutan dan pengguna jalan;
 - f. penyelenggaraan dan pengendalian angkutan sungai danau dan penyeberangan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian operasional perhubungan darat;
 - h. penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
 - i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas bidang perhubungan darat meliputi:

- a. memverifikasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas;
- b. mengoordinasikan bimbingan teknis perhubungan darat;
- c. mengoordinasikan pemanduan jaringan pelayanan angkutan darat yang wilayah operasinya melayani angkutan antar kota dalam Provinsi, dan angkutan pariwisata;
- d. mengevaluasi dan mengendalikan penyiapan prasarana dan sarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;

- e. mengawasi dan membina penyelenggara pelayanan angkutan dan pengguna jalan;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- g. mengevaluasi dan mengendalikan operasional perhubungan darat;
- h. membina dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. mengevaluasi, monitoring dan membuat laporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perhubungan Darat, membawahi :

- 1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) ;
- 3) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis manajemen rekayasa Lalu Lintas. Dalam Melaksanakan Tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

- b. pelaksanaan dan pengembangan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- c. pelaksanaan dan pengembangan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- d. pelaksanaan dan pengembangan rencana umum jaringan trayek;
- e. pelaksanaan dan pengembangan wilayah operasi angkutan orang dan barang;
- f. pelaksanaan dan pengembangan tarif angkutan dan barang;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kajian teknis perijinan angkutan orang dan barang;
- h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- c. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

- d. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan rencana umum jaringan trayek;
- e. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan wilayah operasi angkutan orang dan barang;
- f. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan tarif angkutan dan barang;
- g. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kajian teknis perijinan angkutan orang dan barang;
- h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLAJ dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat. mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, Keselamatan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Melaksanakan Tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan sarana dan prasarana LLAJ;

- b. pelaksanaan dan pengembangan rencana kebutuhan fasilitas keselamatan prasarana perhubungan darat;
- c. pelaksanaan dan pengembangan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi;
- d. pelaksanaan dan pengembangan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- e. pelaksanaan dan pengembangan fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- h. melaksanakan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLAJ meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan sarana dan prasarana LLAJ;
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan rencana kebutuhan fasilitas keselamatan prasarana perhubungan darat;

- c. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi;
- d. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- e. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Dalam

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. pelaksanaan dan pengembangan Pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; yang tidak diusahakan;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan pertimbangan teknis (rekomendasi/advis) permohonan perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan dan pengembangan operasional Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. pelaksanaan dan pengembangan tarif jasa pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- h. pelaksanaan dan pengembangan lokasi Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;;
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; yang tidak diusahakan;
- d. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan pertimbangan teknis (rekomendasi/advis) permohonan perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;;
- e. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan operasional Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- f. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu angkutan sungai, danau dan penyeberangan;;

- g. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan tarif jasa pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;;
- h. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan lokasi Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten / Kota dalam Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Dengan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan menyusun rencana angkutan laut. Dalam Melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan operasional angkutan laut;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian ikegiatan operasional kepelabuhanan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan operasional perkapalan dan kepelautan, jasa

- maritime, penjagaan penyelamatan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut tingkat Provinsi;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian bahan pembinaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR), Daerah Lingkungan Kepentingan Kepelabuhananan (DLKP);
 - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan kepelabuhananan yang tidak diusahakan;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penilikan kelancaran lalu lintas kapal yang berbendera nasional, asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur maupun temporer;
 - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi izin usaha salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelamatan bawah air dalam wilayah Provinsi.
 - j. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan penjagaan, penyelamatan dan kesyahbandaran;
 - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemasangan rambu-rambu laut dalam wilayah laut 0 s/d 12 mil sempadan pantai;
 - l. penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan

- pembuatan laporan;
- m. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- n. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Perhubungan Laut meliputi:

- a. memverifikasi dan mengoordinir kegiatan operasional angkutan laut;
- b. memverifikasi dan mengoordinir kegiatan operasional kepelabuhanan;
- c. memverifikasi dan mengoordinir kegiatan operasional perkapalan dan kepelautan, jasa maritim, penjagaan penyelamatan;
- d. memverifikasi dan mengoordinir terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut tingkat Provinsi;
- e. memverifikasi dan mengoordinir penyiapan bahan pembinaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
- f. memverifikasi dan mengoordinir penyiapan bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR), Daerah Lingkungan Kepentingan Kepelabuhanan (DLKP);
- g. memverifikasi dan mengoordinir Terhadap pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap kepelabuhanan yang tidak diusahakan;
- h. memverifikasi dan mengoordinir penilikan kelancaran lalu lintas kapal yang berbendera

nasional, asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur maupun temporer;

- i. memverifikasi dan mengoordinir penyusunan dokumen pemberian Rekomendasi izin usaha salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelamatan bawah air dalam wilayah Provinsi;
- j. memverifikasi dan mengoordinir kegiatan penjagaan, penyelamatan dan kesyahbandaran;
- k. memverifikasi dan mengoordinir pemasangan rambu-rambu laut dalam wilayah laut 0 s/d 12 mil sempadan pantai;
- l. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- m. mengevaluasi, monitoring dan membuat laporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perhubungan Laut, membawahi :

- 1) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut;
- 2) Seksi Kepelabuhanan;
- 3) Seksi Perkapalan dan Kepelautan.

1) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut

Seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan,

membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis keselamatan pelayaran dan angkutan laut. Dalam Melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pembinaan & pelaksanaan kegiatan angkutan laut dan pelabuhan rakyat serta perusahaan penunjang angkutan laut;
- b. pelaksanaan dan penyusunan rekomendasi perizinan usaha-usaha di pelabuhan laut;
- c. pelaksanaan dan pengembangan trayek pelayaran di wilayahnya;
- d. pelaksanaan dan pengembangan tarif Angkutan Laut dan kegiatan operasional Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
- e. pelaksanaan dan penyusunan konsep surat peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha-usaha di pelabuhan laut;
- f. pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan angkutan laut perintis;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kelancaran lalu lintas angkutan laut baik dalam negeri maupun luar negeri;
- h. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional angkutan laut dan pelayaran rakyat;
- i. pelaksanaan dan pengembangan konsep penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan, laut dan pantai;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan evaluasi monitoring dan pembuatan

laporan; dan

- I. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas seksi Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Laut meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kegiatan angkutan laut dan pelayaran rakyat serta perusahaan penunjang angkutan laut;
- b. menyusun, merencanakan, merancang konsep rekomemdsasi perizinan usaha-usaha di pelabuhan laut;
- c. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan trayek pelayaran di wilayahnya;
- d. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan tarif angkutan laut dan kegiatan operasional Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat;
- e. menyusun, merencanakan, merancang konsep surat peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha-usaha di pelabuhan laut;
- f. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan penyelenggaraan angkutan laut perintis;
- g. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kelancaran lalu lintas angkutan laut baik dalam negeri maupun luar negeri;
- h. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kegiatan operasional angkutan laut dan pelayaran rakyat;

- i. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan konsep penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan, laut dan pantai;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan evaluasi monitoring dan membuat laporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Kepelabuhanan

Seksi Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis Kepelabuhanan. Dalam Melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan kebijaksanaan teknis operasional kepelabuhanan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan bahan pengendalian dan evaluasi tugas kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pihak ketiga bidang kepelabuhanan pemanduan, pengerukan & reklamasi;
- d. pelaksanaan dan pengembangan dengan instansi terkait dalam penentuan batas DLKP/DLKR, DUKS dan pelabuhan khusus;
- e. pelaksanaan dan penyusunan konsep

- rekomendasi pembangunan pelabuhan umum, pelabuhan khusus, dermaga;
- f. pelaksanaan dan pengembangan usulan rencana pembangunan, rehabilitasi fasilitas dan peralatan pelabuhan;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan kinerja operasional pelabuhan;
 - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kebijaksanaan teknis operasional kepelabuhanan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi tugas kepelabuhanan;
- c. menyusun, merencanakan, merancang dan menyiapkan bahan pengendalian & pengawasan pihak ketiga pada kepelabuhanan pemanduan, pengerukan & reklamasi;
- d. mengoordinasikan dengan instansi terkait mengenai penentuan batas DLKP/DLKR, DUKS dan pelabuhan khusus;
- e. menyusun, merencanakan, merancang konsep rekomendasi pembangunan pelabuhan umum,

- pelabuhan khusus dan dermaga;
- f. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan usulan rencana pembangunan, rehabilitasi fasilitas dan peralatan pelabuhan;
 - g. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kinerja operasional pelabuhan;
 - h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan membuat laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Perkapalan dan Kepelautan

Seksi Perkapalan dan Kepelautan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut. Tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis perkapalan dan kepelautan. Dalam Melaksanakan Tugas, Menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan kebijaksanaan teknis operasional kegiatan perkapalan dan kepelautan;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi tugas perkapalan dan kepelautan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pihak ketiga dalam perkapalan dan kepelautan;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian dengan instansi

- terkait dengan kegiatan perkapalan dan kepelautan;
- e. pelaksanaan dan penyusunan konsep rekomendasi pembangunan kegiatan perkapalan dan kepelautan yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran dan pelabuhan;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan usulan rencana pembangunan, rehabilitasi fasilitas dan peralatan kegiatan perkapalan dan kepelautan;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan kinerja operasional kegiatan perkapalan dan kepelautan;
 - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Perkapalan dan Kepelautan meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, merancang dan menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis operasional kegiatan perkapalan dan kepelautan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi tugas perkapalan dan kepelautan;
- c. menyusun, merencanakan, merancang dan menyiapkan bahan pengendalian & pengawasan pihak ketiga dalam perkapalan dan kepelautan;
- d. menyusun, merencanakan, merancang dan

- mengoordinasikan dengan instansi terkait pada kegiatan perkapalan dan kepelautan;
- e. membuat konsep rekomendasi pembangunan kegiatan perkapalan dan kepelautan yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran dan pelabuhan;
 - f. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan usulan rencana pembangunan, rehabilitasi fasilitas dan peralatan kegiatan perkapalan dan kepelautan;
 - g. menyusun, merencanakan, merancang dan mengembangkan kinerja operasional kegiatan perkapalan dan kepelautan;
 - h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan membuat laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan

Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan di bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan. Dalam Melaksanakan tugas,

Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian program kerja bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan teknis terhadap pembangunan fasilitas transportasi darat, laut dan udara;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana keselamatan transportasi darat, laut dan udara;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pemberian bantuan dalam investigasi kecelakaan transportasi darat, laut dan udara;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pengendalian operasional darat, laut dan udara;
- g. penyelenggaraan penilikan kelancaran lalu lintas transportasi darat, laut dan udara;
- h. penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan dari pemerintah pusat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan meliputi:

- a. melaksanakan verifikasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan;
- b. melaksanakan verifikasi dan koordinasi kebijakan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan;
- c. melaksanakan verifikasi dan koordinasi pembinaan teknis terhadap pembangunan fasilitas transportasi darat, laut dan udara;
- d. mengawasi dan mengendalikan prasarana dan sarana keselamatan transportasi darat, laut dan udara;
- e. mengoordinasikan pemberian bantuan dalam investigasi kecelakaan transportasi darat, laut dan udara;
- f. mengoordinasikan pengawasan pengendalian operasional darat, laut dan udara;
- g. mengoordinasikan penilikan kelancaran lalu lintas transportasi darat, laut dan udara;
- h. melaksanakan tugas-tugas perbantuan dari pemerintah pusat;
- i. melakukan Pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. mengevaluasi, monitoring dan membuat laporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan, membawahi :

- 1) SeksiPengendalian;
- 2) Seksi Operasional;
- 3) Seksi Kebandarudaraan.

1) Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, perencanaan transportasi. Dalam Melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkajian program penanggulangan kecelakaan transportasi;
- b. pelaksanaan dan pengkajian data dan informasi transportasi;
- c. pelaksanaan dan pengkajian aspirasi masyarakat pembangunan transportasi;
- d. pelaksanaan dan penganalisaan daerah rawan kecelakaan;
- e. pelaksanaan dan pengkajian sarana transportasi;
- f. pelaksanaan dan pengawasan transportasi;
- g. pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan

- pembuatan laporan;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Pengendalian meliputi:

- a. menyusun dan mengkaji program penanggulangan kecelakaan transportasi;
- b. menyusun dan mengkaji data dan informasi transportasi;
- c. menyusun dan mengkaji aspirasi masyarakat terhadap pembangunan transportasi;
- d. menyusun dan menganalisa daerah rawan kecelakaan;
- e. menyusun dan mengkaji sarana transportasi;
- f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan transportasi;
- g. menyusun, merencanakan dan merancang konsep penegakan hukum oleh PPNS di bidang perhubungan darat;
- h. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Operasional

Seksi Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan

Kebandarudaraan. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, operasional transportasi. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkajian ulang rencana operasional moda transportasi;
- b. pelaksanaan dan pengkajian dalam penentuan operasional gedung VIP bandar udara;
- c. pelaksanaan dan pembantuan penyusunan konsep Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- d. pelaksanaan dan pengevaluasian hasil analisis dampak lalu lintas;
- e. pelaksanaan dan pengevaluasian serta pengendalian program penanggulangan kecelakaan moda transportasi;
- f. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan operasional moda transportasi;
- g. pelaksanaan dan penyusunan konsep penentuan wilayah operasi dan pengawasan moda angkutan;
- h. pelaksanaan dan pengevaluasian tarif angkutan orang dan barang;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Operasional meliputi:

- a. menyusun dan mengkaji ulang rencana operasional moda transportasi;
- b. mengkaji ulang penentuan operasional gedung VIP bandar udara;
- c. menyusun dan merancang konsep Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas;
- e. mengevaluasi dan mengendalikan program penanggulangan kecelakaan moda transportasi;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan operasional moda transportasi;
- g. menyusun dan merencanakan konsep penentuan wilayah operasi dan pengawasan moda angkutan;
- h. mengevaluasi dan mengkaji ulang tarif angkutan orang dan barang;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Kebandarudaraan

Seksi Kebandarudaraan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan. mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan,

membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis terkait Kebandarudaraan. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan perancangan konsep kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pengelola Bandar Udara;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pengelola Bandar Udara;
- c. pelaksanaan dan pengusulan rencana rute penerbangan baru;
- d. pelaksanaan dan pemberian kajian pengembangan bandar udara;
- e. pelaksanaan dan pengkajian data lalu lintas angkutan penumpang, kargo dan pos;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Kebandarudaraan meliputi:

- a. menyusun, merencanakan, dan merancang konsep kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pengelola Bandar Udara;
- b. menyusun, merencanakan, merancang dan mengoordinasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pengelola Bandar Udara;
- c. menyusun, mengusulkan rencana rute

- penerbangan baru;
- d. menyusun, merencanakan dan member kajian pengembangan Bandar Udara;
- e. mengkaji data lalulintas angkutan penumpang, kargo dan pos untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sumber Daya Manusia

Saat ini SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah pegawai sebanyak 54 pegawai yang tersebar pada 4 Bidang dengan komposisi sebagai berikut :

1) Bidang Sekretariat

Tabel 2.1
Bidang Sekretariat

No	Jumlah Pegawai (orang)		Jenjang Pendidikan (orang)	Kompetensi Diklat Penjenjangan dan Teknis (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	
	L	P			L	P
1			S3	PIM II	1	
2	4	2	S2	PIM III	1	
3	3		S1	PIM IV	2	1
4			D4	Jumlah	4	1
5	2		SMA	Diklat Anjab	1	1
6			SMP	Diklat Keuangan	1	1
7			SD	Diklat Perencanaan	5	
Jumlah	9	2		Jumlah	7	2

2) Bidang Perhubungan Darat

Tabel 2.2
Bidang Perhubungan Darat

No	Jumlah Pegawai (orang)		Jenjang Pendidikan (orang)	Kompetensi Diklat Penjenjangan dan Teknis (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	
	L	P			L	P
1			S3	PIM II		
2			S2	PIM III	2	
3	8	1	S1	PIM IV	4	
4	2		D4	Jumlah	6	
5	1	2	D3			
6	1	1	D2	Diklat PPNS	2	
7	3		SMA	Diklat Andalalin	2	1
8			SMP	Diklat Audit Keselamatan Jalan	3	
9			SD	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	2	1
Jumlah	15	4		Jumlah	9	2

3) Bidang Perhubungan Laut

Tabel 2.3
Bidang Perhubungan Laut

No	Jumlah Pegawai (orang)		Jenjang Pendidikan (orang)	Kompetensi Diklat Penjurangan dan Teknis (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	
	L	P			L	P
1			S3	PIM II		
2	3	1	S2	PIM III	1	
3		4	S1	PIM IV	1	2
4			D4	Jumlah	2	2
5	1		D3	Diklat Transportasi Laut	1	2
Jumlah	4	5		Jumlah	1	2

4) Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan

Tabel 2.4
Bidang Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan

No	Jumlah Pegawai (orang)		Jenjang Pendidikan (orang)	Kompetensi Diklat Penjurangan dan Teknis (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	
	L	P			L	P
1			S3	PIM II		
2	2		S2	PIM III		1
3	4	2	S1	PIM IV	3	
4			D4	Jumlah	3	1
5	3		D3			
6			D2			
7	4		SMA	Diklat Transportasi Udara	1	
8			SD	Diklat Dasar Transportasi Darat	5	1
Jumlah	13	2		Jumlah	6	1

2. Asset / Modal

Jumlah Asset Dinas Perhubungan sampai dengan Bulan Juni 2017 Total Asset Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 131.350.618.386,71, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Asset Dinas Perhubungan

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah	570 M ²	28.500.000	Sebelah Utara Bandara Depati Amir
2	Alat-Alat Besar	2 Unit	161.535.000	Genset dan Stationary Water Pump
3	Alat-Alat Angkutan	12 Unit	1.643.080.500	Station Wagon (2), Micro Bus (1), Mini Bus (2), Pick Up (1) Sepeda Motor (6)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 Unit	18.700.000	GPS (2)
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	344 Unit	1.771.844.589	
6	Alat-Alat Kedokteran	1 Unit	1.195.161.990	X-Ray Unit
7	Alat Laboratorium	5 Unit	25.685.000	Tv Monitor
8	Alat-Alat Perenjataan /	1 Unit	31.415.000	CCTV

	Keamanan			
9	Bangunan Gedung		20.095.511.300	Kantor Dishub, Jembatan Timbang, Pel. P.Mendanau, Pel. Tjg Tinggi, Bangunan Rambu SBNP
10	Monumen		18.257.614.904	LPJU, Traffic Light dan Rambu Lalin
11	Jalan dan Jembatan		70.676.203.053	Marka Jalan dan Landasan Pacu
12	Bangunan Air/Irigasi		454.626.000	Rambu SBNP
13	Jaringan		14.925.000	Jaringan Telepon
14	Buku dan Perpustakaan	529 Buah	2.575.448.000	Buku dan Peraturan Perundangan, Peta dan Kaset Video
Jumlah			131.350.618.386,71	

Dengan rincian Barang berdasarkan Kartu Inventaris Barang sebagai berikut :

Tabel 2.6
KIB Dinas Perhubungan

KIB	TOTAL NILAI
A	28.500.000
B	6.050.117.000,39
C	48.464.624.000,61
D	71.287.491.000,04
E	2.970.987.000,50
F	2.548.897.000,60

Dengan Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpasang hingga Desember 2016 sebanyak :

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah	
1	Rambu-Rambu Lalin	2327	Unit
2	Marka Jalan	103911	M
3	Pagar Pengaman Jalan	3858	M
4	Warning Light	21	Unit
5	Traffic Light	6	Lokasi
6	Delineator	3805	Buah
7	Paku Jalan	3503	Buah
8	Pita Penggaduh	426	Buah
9	Penerangan Jalan Umum	208	M

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016). Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase Pegawai Dinas Perhubungan yang telah memperoleh Pendidikan dan Pelatihan			75%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	15%	15%	15%	15%	80%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Siswa/i SMA sederajat yang mendapatkan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi dari Pemprov Babel			100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
3	Prosentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas			8,2%	7,3%	8,2%	8,5%	8,3%	8,2%		30,3%	5,03%	16,8%			369%	59%	202%	
4	Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Masyarakat			1.5%	1,4%	2%	2,2%	2,1%	1,5%		24,2%	2,79%	19,2%			1282%	126%	914%	
5	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan terhadap Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan			50%	10%	10%	10%	10%	10%	4%	8%	2%	4%	6%	40%	80%	20%	40%	60%
6	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan terhadap kondisi optimal			30%			20%	25%	30%			20%	25%	30%			100%	100%	100%
7	Persentase Peningkatan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin			65%	15%	20%	35%	60%	65%	15%	20%	35%	60%	65%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dapat direalisasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	85%	50%	60%	80%	80%	85%	50%	60%	80%

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	4.465.127.034	4.362.166.065	4.728.635.720	4.988.669.797	6.120.444.378	3.525.008.137	4.155.756.563	4.483.024.318	4.620.846.682	5.919.567.776	78,94	95,27	97,57	92,63	99,55	7,27%	11,85%
Belanja Langsung	14.847.915.000	41.048.667.250	29.506.175.000	25.253.514.750	30.619.396.500	13.660.615.993	35.944.060.869	22.998.014.360	21.653.428.578	27.276.254.910	92,01	87,56	71,35	85,74	75,07	6,35%	5,03%
Total	19.313.042.034	45.410.833.315	34.234.810.720	30.242.184.547	36.739.840.877	17.185.624.130	40.099.817.432	27.481.038.678	26.274.275.260	33.195.822.686	88,98	88,30	80,27	86,88	87,31	7,33%	6,87%

Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami naik dan turun dari setiap. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Anggaran Dinas Perhubungan setiap tahunnya sebesar 7,33% dan rata-rata Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan sebesar 6,87%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Menentukan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Menggunakan Analisis (S.W.O.T) sebagaimana Tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10
Analisis SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan/ <i>Strengths</i> Jumlah pulau-pulau berpenduduk Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jalur sabuk tengah transportasi Sumber Daya Alam Kepulauan Bangka Belitung	(+) Peluang / <i>Opportunities</i> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada ALKI I Kebijakan nasional yang menjadikan Indonesia sebagai Poros maritim dunia
(-) Kelemahan/ <i>Weaknesses</i> Kualifikasi SDM Perhubungan yang masih kurang Belum dijadikannya tataran transportasi wilayah sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan transportasi Kondisi geografis provinsi kepulauan	(-) Ancaman / <i>Threats</i> Tingkat Inflasi Konflik kepentingan antar sektor Perubahan arah kebijakan pemerintah pusat di bidang perhubungan

a. Peluang

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada

ALKI I;

3. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jalur sabuk tengah transportasi.
4. Sumber Daya Alam Provinsi

b. Tantangan

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan, kemacetan dan kecelakaan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Kegiatan pembangunan kawasan/pusat kegiatan belum terkendali, mengakibatkan timbulnya daerah rawan kemacetan;
6. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan.
7. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
8. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut pada pulau-pulau berpenghuni, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
9. Belum dilaksanakannya pengawasan terhadap kegiatan bongkar muatan Barang di pelabuhan dan belum dilakukannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran (SBNP) kapal laut, mengakibatkan timbulnya kerawanan;

10. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan persyaratan pembangunan dan kegiatan lainnya pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), mengakibatkan rawannya keselamatan penerbangan;
11. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
12. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi, mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah;
13. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah disusun Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tugas Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;

- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Dinas Perhubungan adalah selaku perumus kebijakan teknis, memberikan perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota, fungsi pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kesekretariatan. Dalam menterjemahkan wewenang tersebut, kebijakan yang melandasi adalah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa transportasi dan reposisi Dinas Perhubungan dalam rangka good governance.

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini terutama, adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN, yang tarif pelayanannya cenderung di bawah harga (underpriced). Hal itu terjadi karena kebijakan tarif yang diambil masih lebih menekankan pertimbangan politis daripada pertimbangan finansial. Akibatnya, kinerja dan pelayanan transportasi di Indonesia pada umumnya belum optimal. Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap aset yang sudah

terbangun merupakan permasalahan klasik yang selalu mengemuka, yang juga berakibat pada ketidakmampuan melakukan investasi baru (*underinvestment*) untuk memenuhi pertambahan permintaan pelayanan, sedangkan partisipasi investor swasta masih sangat rendah. Implikasinya adalah tidak terlayannya seluruh permintaan akan layanan transportasi terutama pada trayek-trayek perintis.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pencapaian tingkat kinerja belum optimal, ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi dan Keahlian di bidang Transportasi
2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
3. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, dan pertumbuhan jumlah penduduk serta kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
4. Jaringan trayek yang belum terstruktur , teratur, terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efektif dan efisien;
5. Kurangnya data-data di bidang perhubungan sehingga menyulitkan untuk menentukan arah kebijakan perhubungan;

6. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektoral di bidang perhubungan sehingga mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perhubungan;
7. Belum optimalnya pembangunan sektor perhubungan di pulau-pulau berpenduduk sehingga belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan, sehingga masih banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat;
9. Belum Optimalnya Pengembangan Bandara H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
10. Belum adanya keselarasan Rencana Strategis PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemecahan masalah

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) di bidang Transportasi.
2. Mengajukan usulan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis perhubungan bagi para pegawai.

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi bidang Perhubungan dengan Kabupaten/Kota setiap tahun guna sinkronisasi program pembangunan.
4. Mengusulkan dan mengupayakan kepada pemerintahan daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar tersedianya prosentase anggaran yang lebih proposional guna mendukung percepatan terwujudnya visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Melaksanakan Review Renstra PD agar selaras dengan Renja SKPD.
6. Menyusun Renstra Dinas Perhubungan 2017 – 2022 dengan mempedomani RPJP, Renstra K/L, RPJPD, RPJMD serta mempertimbangkan review terhadap Tatrawil yang dilakukan Kemenhub
7. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan terkait tingginya angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
OPD Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (darat, laut dan udara)	16,82%	RPJMD 7%	Perbaikan Kualitas Fasilitas Keselamatan Transportasi	Dukungan Pemerintah Pusat dan Stakeholder Lainnya	Masih Perlu Peningkatan Kualitas Keselamatan
Penurunan pelanggaran	19,24%	RPJMD 1,2%	Peningkatan	Dukungan	Masih Perlu

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
n lalu lintas (darat, laut dan udara) dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas (darat, laut dan udara)			Pelayanan dan Perluasan Akses Informasi Keselamatan Transportasi Kepada Masyarakat	Pemerintah Pusat dan Stakeholder Lainnya	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan akses Informasi
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam rangka mendukung pelayanan transportasi pada masyarakat dan mobilitas barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah.	44%	RPJMD 43%	Peningkatan Kualitas dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sarana	Dukungan Pemerintah Pusat dan Stakeholder Lainnya	Belum maksimalnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang akan dicapai oleh masyarakat pada masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi””. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan

Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 4 (empat) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur maka kebijakan Pemerintah Provinsi mengarah kepada adanya keterpaduan sistem transportasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mengurangi gap informasi sampai ke seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hasil penelaah terhadap visi dan misi Gubernur yang dikaitkan dengan tupoksi SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas; Tujuan	1. Beberapa daerah Kabupaten/Kota masih minim pelayanan transportasi;	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu dukungan APBN atau peran BUMN atau swasta
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	2. Beberapa wilayah Kabupaten/Kota masih kurang sarana dan prasarana transportasi		
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	3. Kerjasama antar OPD dalam forum OPD perlu ditingkatkan lagi (penyelenggaraan transportasi bersinergi dengan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana)		
	Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan	4. Masih banyak daerah masih minim pelayanan informasi		

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Pelayanan Transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri dan produktif.

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Gambaran capaian kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Startegis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, Visi Kementerian Perhubungan “Mewujdkan Transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”, pelayanan SKPD Dinas Perhubungan berupaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang transportasi.

Pelayanan Transportasi dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian yang mendorong permintaan masyarakat akan moda transportasi khususnya di daerah-daerah terpencil, pengembangan wilayah, peningkatan produksi di berbagai bidang dan munculnya paradigma baru yang menuntut keterkaitan (interaksi), keterpaduan (interelasi), serta saling membutuhkan (interdependensi) antar pranata (institusi dan regulasi) semua bidang kehidupan yang harus diantisipasi dengan Sistem Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal. maka dapat diuraikan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan
Telaahan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai	Belum adanya masterplan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	Belum terlaksananya penyusunan Review terhadap Tatrawil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengganggaran yang memadai untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi nasional

	dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda			
2.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Masih kurangnya informasi tentang keselamatan yang diterima masyarakat	Masih kurangnya kesadaran keselamatan dalam berlalu lintas.	- Meningkatkan pengawasan, penegakan disiplin, dan pelaksanaan sosialisasi. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas keselamatan
3.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca	Masih kurangnya pengawasan terhadap pentingnya penurunan emisi gas rumah kaca.	Meningkatkan serta mendorong kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan
4.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Belum maksimalnya pengelolaan angkutan umum berbasis angkutan massal perkotaan	Lambatnya perkembangan angkutan massal perkotaan yang disebabkan masyarakat lebih memilih angkutan pribadi sebagai pilihan utama dalam beraktivitas.	Perbaiki sistem pengelolaan angkutan massal dan peremajaan angkutan umum
5.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan	Perlunya peningkatan dan integrasi teknologi informasi dengan tata kelola transportasi	Belum terlaksananya sistem teknologi informasi dan skema manajemen transportasi perkotaan	Meningkatkan manajemen transportasi yang berbasis aplikasi dan teknologi informasi

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dengan membandingkan struktur dan pola ruang yang ada saat ini dengan rencana pembangunan, akan diperoleh indentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersaji sebagai mana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Kewenangan OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Masih kurangnya Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	- Belum selarasnya dokumen perencanaan K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Belum adanya mekanisme penetapan aset.	
2.	Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu.	Belum disusunnya masterplan pelabuhan	Belum selarasnya dokumen perencanaan K/L, Provinsi dan	

		belinyu	Kabupaten / Kota.	
3.	Perwujudan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Belum disusunnya masterplan Pembangunan Dermaga dan terminal pelabuhan	Belum selarasnya dokumen perencanaan K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota.	

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusa isu strategis

yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka menengah daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Isu Ekonomi
 - a. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
 - b. Tingginya tingkat pengangguran

- c. Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
 - d. Kemandirian Pangan Rendah
 - e. Tingginya tingkat inflasi
 - f. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
 - g. Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
 - h. Tingkat Investasi Swasta Rendah
 - i. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Isu Tata Kelola Pemerintah
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
 3. Isu Infrastruktur dan Konektivitas
 - a. Penguatan ketahanan energi
 - b. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan infrastruktur terutama di daerah dan pulau-pulau terpencil
 4. Isu Sumber Daya Manusia
 - a. Kualitas SDM masih rendah
 - b. Pengguna Narkoba dan penderita HIV AID's Meningkat
 5. Isu Lingkungan
Kualitas lingkungan hidup yang rendah dan kerawanan bencana
Isu Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu :

1. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus Pembangunan pada pengembangan Pelabuhan pendukung tol laut.
3. Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan adapun sasaran dari isu strategis diatas adalah :
 - a. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
 - b. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan
 - c. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Dengan indikator Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS).
4. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah
5. Peningkatan Status Bandara Depati Amir dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin menjadi Bandara

Internasional paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah suatu penjabaran terhadap keadaan yang diinginkan 5 (lima) tahun mendatang. pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 (lima) tahun mendatang, ditetapkanlah Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Dari pernyataan visi diatas, terkandung 5 (lima) makna, yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani

Pemerintah.

2. **Sejatera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,

kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Perumusan misi mengacu kepada mandat dan kewenangan yang telah diberikan rakyat kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan misi sebagai berikut:

- 1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**
- 2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas**
- 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia unggul dan handal**
- 4. Peningkatan kesehatan masyarakat**
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi**
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**

Keterkaitan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pembantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi ada pada Misi ke-2 yaitu : **Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas**, adalah Dinas Perhubungan Provinsi dituntut untuk melaksanakan pembangunan konektivitas daerah yang berkualitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dari uraian visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Meningkatkan kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor pariwisata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor Industri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.
5. Mewujudkan kelancaran arus keluar masuk barang melalui pelabuhan untuk menurunkan angka inflasi.
6. Mewujudkan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang optimal sebagai penunjang konektivitas.
7. Mewujudkan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal yang optimal sebagai penunjang konektivitas.
8. Mewujudkan Bandara Depati Amir sebagai Bandara Internasional.
9. Meningkatkan kontribusi perhubungan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan.

10. Mewujudkan Transportasi yang berkualitas sebagai pendukung Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
11. Mewujudkan Transportasi yang berkualitas sebagai pendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dari tujuan diatas ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut :

Sasaran :

1. Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K Meningkatkan pengembangan Pembangunan pariwisata.
2. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan.
3. Meningkatnya mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata.
4. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka.
5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang.

6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok.
7. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba.
8. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung.
9. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing.
10. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera.
11. Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk.
12. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular.
13. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK).
14. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat.
15. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat.

16. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai.
17. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu.
18. Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan.
19. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam.
20. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut.
21. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut.
22. Meningkatnya konektivitas perhubungan darat.
23. Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir.
24. Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan.
25. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi.
26. Meningkatkan kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.

Pernyataan tujuan dan Sasaran disajikan dalam sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi		Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan	10%	18%	28%	23%	
		1. Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K	1. Persentase penurunan pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K	00%	25%	25%	25%	225%
		2. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan	1. Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Perairan Kawasan Strategis Perikanan	20%	10%	30%	20%	15%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor pariwisata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi		Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor pariwisata	0,6%	11,6%	14,2%	13,6%	14,1%
		1. Meningkatkan mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata	Persentase peningkatan mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata	0%	14%	29%	20%	15%
		2. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	0%	20%	20%	0%	0%
		3. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang.	0%	10%	10%	8%	15%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	0%	10%	10%	15%	15%
		5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	0%	10%	10%	15%	15%
		6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	0%	15%	15%	25%	25%
		7. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan di Kawasan Peruntukan	0%	5%	5%	10%	10%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Gunung Menumbing	Pariwisata Gunung Menumbing					
		8. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	0%	0%	4%	5%	7%
		9. Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi	5%	20%	25%	25%	25%
3.	Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor Industri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi		Persentase kontribusi Perhubungan pada sub sektor industri	0%	3%	9%	10%	14%
		1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	0%	5%	7%	9%	12%
		2. Meningkatnya kelengkapan	Persentase kelengkapan	0%	0%	0%	10%	20%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)					
		3 Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	10%	10%	0%	0%
		4 Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	0%	0%	0%	20%
		5 Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai	Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Kawasan Strategis Industri Sadai	0%	0%	7%	10%	0%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6 Meningkatkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	0%	0%	30%	30%	30%
IV.	Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.		Persentase Besarnya PAD dan Kontribusi PAD secara Keseluruhan	0%	10%	10%	20%	0%
		1 Meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan	Persentase Pendapatan daerah dari Pengelolaan Bandara Depati Amir	0%	10%	10%	20%	20%
5.	Mewujudkan kelancaran arus keluar masuk barang melalui pelabuhan untuk menurunkan angka inflasi.		Persentase penurunan angka inflasi di sektor perhubungan laut.	10%	20%	30%	0%	0%
		1. Meningkatkan kelengkapan dokumen perencanaan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	10%	20%	30%	0%	0%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam	pembangunan pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam yang terlaksana.					
6.	Mewujudkan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang optimal sebagai penunjang konektivitas		Persentase pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang terbangun dan terpelihara.	0%	20%	40%	10%	10%
		1. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut	Persentase peningkatan kondisi pelabuhan/dermaga yang layak dalam mendukung konektivitas	0%	20%	40%	10%	10%
7.	Mewujudkan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal yang optimal sebagai penunjang konektivitas.		Persentase pembangunan sarana dan prasarana terminal type-B	5%	5%	5%	5%	5%
		1. Meningkatnya konektivitas perhubungan darat	Persentase peningkatan jumlah penumpang moda angkutan darat.	5%	5%	5%	5%	5%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Mewujudkan Bandara Depati Amir sebagai Bandara Internasional		Status Internasional Bandara Depati Amir	40%	30%	30%	0%	0%
		Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir	Persentase Perjanjian Kerjasama yang terealisasi	40%	30%	30%	0%	0%
9.	Meningkatkan kontribusi perhubungan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan		Persentase kontribusi perhubungan sebagai pendukung sektor pendidikan	40%	30%	30%	0%	0%
		Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir	Persentase Perjanjian Kerjasama yang terealisasi	40%	30%	30%	0%	0%
10.	Mewujudkan Transportasi yang berkualitas sebagai pendukung Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan			2,6%	3,2%	3,7%	4,3%	4,9%
		Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi	2,6%	3,2%	3,7%	4,3%	4,9%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Mewujudkan Transportasi yang berkualitas sebagai pendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Prosentase kontribusi sektor perhubungan terhadap Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	10%	14%	11%	17%	18%
		Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.	Persentase Peningkatan Kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.	10%	14%	11%	17%	18%

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada BAB ini disajikan Strategi dan Arah Kebijakan kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk merumuskan Strategi dan Kebijakan OPD Dinas Perhubungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana Tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.			
Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pemberian Rekomendasi Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Peningkatkan Pengawasan Terhadap Pemberian Rekomendasi Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan	Meningkatkan Fasilitas Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan

Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor pariwisata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata	Meningkatkan Sarana dan Prasana penunjang Perhubungan kawasan wisata.	Peningkatan Sarana dan Prasana penunjang Perhubungan kawasan wisata.
		Meningkatkan Sarana Perhubungan penunjang Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian	Peningkatan Sarana Perhubungan penunjang Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian
		Meningkatkan Sarana Perhubungan penunjang Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	eningkatan Sarana Perhubungan penunjang Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Kawasan Kota Tua Muntok	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kawasan Kota Tua Muntok

	Kawasan Kota Tua Mentok		
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Penyediaan Perlengkapan Jalan di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing
	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Meningkatkan Sarana dan Prasana Perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Peningkatan Sarana dan Prasana Perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
	Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk	Meningkatkan Sarana dan Prasana Perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Peningkatan Sarana dan Prasana Perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil
Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan	Peningkatan

kontribusi perhubungan pada sektor Industri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Sarana dan Prasarana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	Sarana dan Prasarana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan
	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik
	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Industri Sadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Industri Sadai
	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung

	pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Bandara Depati Amir	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Bandara Depati Amir
Mewujudkan kelancaran arus keluar masuk barang melalui pelabuhan untuk menurunkan angka inflasi.	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Pelabuhan Pengganti Pangkalbalam.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Pelabuhan Pengganti Pangkalbalam.
Mewujudkan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang optimal sebagai penunjang konektivitas	Meningkatnya konektivitas perhubungan laut	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut penunjang konektivitas	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut penunjang konektivitas
Mewujudkan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal yang optimal sebagai penunjang konektivitas.	Meningkatnya konektivitas perhubungan darat	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat penunjang konektivitas	Pembangunan terminal type-B
Mewujudkan Bandara Depati Amir sebagai Bandara Internasional	Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara penunjang konektivitas	Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Angkasa Pura II, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupten Bangka Tengah.

Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi perhubungan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan	Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan	Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan penunjang pendidikan	Peningkatan penyediaan dan pembangunan Sarana dan Praasarana Perhubungan penunjang pendidikan
Misi 4 : Meningkatkan kesehatan masyarakat;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tranportasi yang berkualitas sebagai pendukung Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi	Meningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas
Misi 6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tranportasi yang berkualitas sebagai pendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sektor transportasi	Peningkatan pengawasan dan pengendalian sektor transportasi

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah terpencil serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa agar mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Dinas Perhubungan sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; melakukan penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan; serta pembinaan agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada BAB ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab	
										Tahun													
										2018		2019		2020		2021		2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1	2																				
Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltian dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatkan kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi					Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan	N.A.	-	10,00%	1.902.000.000	17,50%	1.794.406.200	27,50%	6.864.686.220	22,50%	4.254.779.842	20,00%	3.854.701.576	23,00%	18.670.573.838	DISHUB	
			1	Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K			Persentase penurunan pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K	N.A.	-	0%	-	25%	894.406.200	25%	802.186.220	25%	862.279.842	25%	924.701.576	100,00%	3.483.573.838	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT			Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	N.A.	-	0%	-	25%	894.406.200	25%	802.186.220	25%	862.279.842	25%	924.701.576	100,00%	3.483.573.838	DISHUB
							Pengawasan atas Rekomendasi Pelabuhan Khusus / Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) diawasi.	-	0	-	0	35 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	300.000.000	40 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	315.000.000	45 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	330.750.000	50 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	347.287.500	50 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1.293.037.500	DISHUB	
							Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran	-	0	-	0	100 orang	180.000.000	100 orang	197.500.000	100 orang	205.375.000	100 orang	213.643.750	400 Orang	796.518.750	DISHUB	
							Survey dan Inventarisasi kebutuhan sektor perhubungan laut	1 Dok	180.040.000	-	0	1 Dok	150.000.000	1 Dok	175.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	225.000.000	4 Dokumen	750.000.000	DISHUB	
							Pembinaan bagi Stakeholder Sektor Perhubungan Laut	80 orang	125.525.200	-	0	40 orang	104.260.200	40 orang	114.686.220	40 orang	126.154.842	40 orang	138.770.326	80 ORANG	483.871.588	DISHUB	
							Pengadaan Peralatan Survey (Drone, GPS, Sounder, HT, Camera, Peta)	-	0	-	0	1 paket (5 unit alat survey dan 6 lembar peta)	160.146.000	-	0	-	0	-	0	1 Paket Peralatan	160.146.000	DISHUB	
			2	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan			Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Perairan Kawasan Strategis Perikanan			20%	1.902.000.000	10%	900.000.000	30%	6.062.500.000	20%	3.392.500.000	15%	2.930.000.000	95%	15.187.000.000	DISHUB	
							PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT			30%	1.902.000.000	20%	450.000.000	30%	2.800.000.000	0%	-	-	-	80%	5.152.000.000	DISHUB	
							SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	2 dokumen	450.000.000		0	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DISHUB	
							Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	3 unit	1.902.000.000	-	0,0	3 unit	2.800.000.000	-	0	-	0	6 unit	4.702.000.000	DISHUB	

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun												
										2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	-	0	40%	0	20%	450.000.000	60%	2.800.000.000	0	0%	0	0%	80%	3.250.000.000	DISHUB
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	2 dokumen	450.000.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DISHUB
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	3 unit (Nasik)	2.800.000.000	-	0	-	0	3 Unit	2.800.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	N.A.	-	0%	-	0%	-	20%	462.500.000	60%	2.930.000.000	0%	-	80%	3.392.500.000	DISHUB
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	462.500.000	-	0	-	0	2 Dokumen	462.500.000	DISHUB
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	-	3 unit	2.930.000.000	-	0	3 Unit	2.930.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	N.A.	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	462.500.000	60%	2.930.000.000	100%	3.392.500.000	DISHUB
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	-	2 dokumen	462.500.000	-	0	2 Dokumen	462.500.000	DISHUB	
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 unit	2.930.000.000	3 Unit	2.930.000.000	DISHUB	
		2	Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor pariwisata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi				Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor pariwisata	N.A.	-	1%	300.000.000	12%	30.814.581.000	14%	38.992.000.000	14%	27.370.000.000	14%	80.483.000.000	30%	177.959.581.000	DISHUB
			3. Meningkatkan mobilitasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata				Persentase peningkatan mobilitasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata	N.A.	-	0	-	14%	5.507.581.000	29%	8.902.500.000	20%	8.790.000.000	15%	19.460.000.000	64%	42.660.081.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut di lokasi wisata	N.A.	-	0%	-	20%	1.650.000.000	30%	3.440.000.000	20%	2.560.000.000	30%	14.560.000.000	100%	22.210.000.000	DISHUB
						Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	N.A.	-	-	0	2 Dokumen (P.Lengkuas dan P.Ketawai)	900.000.000	3 Dokumen (P.Lengkuas, memperak dan pulau tinggi)	1.380.000.000	-	0	-	-	5 Dokumen	2.280.000.000	DISHUB
						SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	N.A.	-	-	0	2 Dokumen (P.Mendanau)	750.000.000	4 Dokumen (P.Lengkuas dan P.Ketawai)	1.560.000.000	4 Dokumen (memperak dan pulau tinggi)	1.560.000.000	-	10 Dokumen	3.870.000.000	DISHUB	
						Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	N.A.	-	-	0	-	0	1 Dokumen (P.Mendanau)	500.000.000	2 Dokumen (P.Lengkuas dan P.Ketawai)	1.000.000.000	2 Dokumen (memperak dan pulau tinggi)	1.560.000.000	5 Dokumen	3.060.000.000	DISHUB
						Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Pulau - Pulau destinasi wisata	Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang terbangun	N.A.	-	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Unit (Pulau Ketawai dan Lengkuas)	13.000.000.000	2 Unit	13.000.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	N.A.	-	0%	-	20%	1.200.000.000	30%	2.300.000.000	0%	-	0%	-	50%	3.500.000.000	DISHUB

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun														
										2018		2019		2020		2021		2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di daerah destinasi wisata	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIIL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di daerah destinasi wisata	N.A.		-	-	0	20%	1.200.000.000	30%	2.300.000.000	-	0	-	0	50%	3.500.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	N.A.		-	0	0	0%	0	50%	462.500.000	50%	2.930.000.000	0%	0	100%	3.392.500.000	DISHUB	
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.		-	0	0	0	0	2 dokumen	462.500.000	-	0	-	0	2 Dokumen	462.500.000	DISHUB	
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.		-	0	0	0	0			3 unit	2.930.000.000	-	0	3 Unit	2.930.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	N.A.		-	0	0	20%	2.257.581.000	16%	2.000.000.000	18%	2.300.000.000	16%	2.000.000.000	70%	8.557.581.000	DISHUB	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIIL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	N.A.		-	-	0	20%	2.257.581.000	16%	2.000.000.000	18%	2.300.000.000	16%	2.000.000.000	70%	8.557.581.000	DISHUB	
						PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	N.A.		-	0%	-	10%	400.000.000	20%	700.000.000	10%	1.000.000.000	30%	2.900.000.000	70%	5.000.000.000	DISHUB	
						Study Kelayakan Pengganti Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengganti Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	N.A.		-	-	0	1 dokumen	400.000.000	-	0		-	0	1 Dokumen	400.000.000	DISHUB		
						Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Dokumen Penyusunan DED dan SID Pelabuhan Baru ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	N.A.		-					2 Dokumen	700.000.000	-	0			2 Dokumen	700.000.000	DISHUB	
						Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Baru ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Baru ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	N.A.		-							1 Dokumen	1.000.000.000	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	DISHUB	
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.		-	-	0	-	0	-	0	-	0	3 unit	2.900.000.000	3 unit	2.900.000.000	DISHUB	
			4.	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	N.A.		-	0%	-	20%	5.500.000.000	20%	5.500.000.000	0%	-	0%	-	100%			
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	N.A.		-	0%	-	50%	5.500.000.000	50%	5.500.000.000	-	-	-	-	100%	11.000.000.000	DISHUB	

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab	
										Tahun													
										2018		2019		2020		2021		2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	N.A.		-	-	0	50%	5.500.000.000	50%	5.500.000.000	-	0	-	0	100%	11.000.000.000	DISHUB
			5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang.	N.A.		-	-	0%	10%	8.500.000.000	10%	8.800.000.000	8%	3.630.000.000	15%	3.993.000.000	15%	24.923.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	N.A.		-	-	0%	10%	5.500.000.000	10%	5.500.000.000	0%	-	0%	-	20%	11.000.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	N.A.		-	-	0%	50%	5.500.000.000	50%	5.500.000.000	-	0	-	0	100%	11.000.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	N.A.		-	-	0%	20%	3.000.000.000	20%	3.300.000.000	30%	3.630.000.000	30%	3.993.000.000	100%	13.923.000.000	DISHUB
						Subsidi Angkutan Pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	Jumlah Bus yang disubsidi melayani angkutan pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	N.A.		-	-	0%	20%	3.000.000.000	20%	3.300.000.000	30%	3.630.000.000	30%	3.993.000.000	100%	13.923.000.000	DISHUB
			6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	N.A.		-	-	0%	20%	2.257.000.000	20%	2.257.000.000	30%	2.800.000.000	30%	2.800.000.000	100%	10.114.000.000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	N.A.		-	-	0%	20%	2.257.000.000	20%	2.257.000.000	30%	2.800.000.000	30%	2.800.000.000	100%	10.114.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Kota Tua Muntok	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Kota Tua Muntok	N.A.		-	-	0%	20%	2.257.000.000	20%	2.257.000.000	30%	2.800.000.000	30%	2.800.000.000	100%	10.114.000.000	DISHUB
			7. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	N.A.		-	-	0%	10%	1.570.000.000	10%	1.570.000.000	15%	1.800.000.000	15%	1.800.000.000	15%	6.740.000.000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	N.A.		-	-	0%	10%	1.570.000.000	10%	1.570.000.000	15%	1.800.000.000	15%	1.800.000.000	50%	6.740.000.000	

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun												
										2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	Persentase perengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(API.L), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	N.A.		0%		10%	1.570.000.000	10%	1.570.000.000	15%	1.800.000.000	15%	1.800.000.000	50%	6.740.000.000	DISHUB
			8. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	N.A.	0	0%		15%	1.780.000.000	15%	1.780.000.000	25%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	25%		DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	N.A.	0	0%		15%	1.780.000.000	15%	1.780.000.000	25%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	80%	7.960.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Persentase perengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(API.L), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	N.A.	0	0%		15%	1.780.000.000	15%	1.780.000.000	25%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	80%	7.960.000.000	DISHUB
			9. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas Jalan di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	N.A.	0	0%		5%	1.200.000.000	5%	1.200.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	30%	5.900.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	N.A.	0	0%		5%	1.200.000.000	5%	1.200.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	30%	5.900.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Persentase jumlah perengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(API.L), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	N.A.	0	0		5%	1.200.000.000	5%	1.200.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	30%	5.900.000.000	DISHUB
			10. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	N.A.	0	-	0	-	0	4%	462.500.000	5%	2.800.000.000	7%	2.900.000.000	16%	6.162.500.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	N.A.	0	-	0	-	0	4%	462.500.000	5%	2.800.000.000	7%	2.900.000.000	16%	6.162.500.000	DISHUB
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	-	0	2 dokumen	462.500.000	-	0	-	-	2 Dokumen	462.500.000	DISHUB
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	3 unit	2.800.000.000	3 unit	2.900.000.000	6 unit	5.700.000.000	DISHUB
			11. Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk				Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi	N.A.	0	5%	300.000.000	20%	4.500.000.000	25%	8.520.000.000	25%	3.600.000.000	25%	45.580.000.000	100%	62.500.000.000	DISHUB

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun												
										2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	N.A.	0	5%	300.000.000	20%	4.500.000.000	25%	8.520.000.000	25%	3.600.000.000	25%	45.580.000.000	100%	62.500.000.000	DISHUB
					Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Study Kelayakan/Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	N.A.	0	1 Dokumen (P.Gresik)	300.000.000	5 Dokumen (lepar, sekuruyit, sumedang, pulau batun dan buku limau)	2.250.000.000	1 Dokumen (tanjung tedung)	3.120.000.000	-	0	-	0	5 Dokumen	5.670.000.000	DISHUB	
					Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	N.A.	0	-	0	6 Dokumen (Liat, Gresik, Selu)	2.250.000.000	10 Dokumen (lepar, sekuruyit, sumedang, pulau batun dan buku limau)	3.750.000.000	2 Dokumen (tanjung tedung)	750.000.000	-	0	16 Dokumen	6.750.000.000	DISHUB	
					Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	N.A.	0	-	0	-	0	3 Dokumen (Liat, Gresik, Selu)	1.650.000.000	5 Dokumen (lepar, sekuruyit, sumedang, pulau batun dan buku limau)	2.850.000.000	1 Dokumen (tanjung tedung)	580.000.000	8 Dokumen	5.080.000.000	DISHUB	
					Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Pelabuhan/ Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil yang terbangun	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	1 unit (Gresik)	10.000.000.000	2 unit (selu dan pulau kebatun)	22.000.000.000	3 unit	32.000.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Jumlah armada pengangkutan	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	45.000.000.000	1 unit	45.000.000.000	DISHUB	
					Pengadaan Kapal Ro-Ro 200 GT	Jumlah unit Kapal Roro yang dibangun	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	45.000.000.000	1 unit	45.000.000.000	DISHUB	
		3. Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor Industri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi				Persentase kontribusi Perhubungan pada sub sektor industri	N.A.	0	0%	-	3%	1.850.000.000	9%	5.030.000.000	10%	4.330.000.000	14%	6.030.000.000	30%	17.240.000.000	DISHUB	
		12. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular				Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	N.A.	0	0%	-	5%	450.000.000	7%	2.800.000.000	9%	-	12%	-	12%	3.250.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	N.A.	0	0%	-	3%	450.000.000	7%	2.800.000.000	9%	-	12%	-	12%	3.250.000.000	DISHUB	
					SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	2 dokumen	450.000.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DISHUB	
					Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	-	-	-	3 unit	2.800.000.000	-	-	-	-	3 unit	2.800.000.000	DISHUB	
		13. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)				Persentase kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	N.A.	0	0%	-	0%	-	0%	-	10%	780.000.000	20%	750.000.000	30%	1.530.000.000	DISHUB	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	N.A.	0	0%	-	0%	-	0%	-	10%	780.000.000	20%	750.000.000	30%	1.530.000.000	DISHUB	
					Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen Study Kelayakan/Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	780.000.000	-	0	1 Dokumen	780.000.000	DISHUB	

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun														
										2018		2019		2020		2021		2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	N.A.	0		-	0		-	0		-	0	2 Dokumen	750.000.000	2 Dokumen	750.000.000	DISHUB	
			14. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Persentase kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	N.A.	0	0%	-	10%	1.400.000.000	10%	1.000.000.000	0%	-	0%	-	20%	2.400.000.000	DISHUB		
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	N.A.	0	0%	-	10%	1.400.000.000	10%	1.000.000.000	0%	-	0%	-	20%	2.400.000.000	DISHUB		
						Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	N.A.	0	-	0	1 Dokumen	1.400.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.400.000.000	DISHUB		
						Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	N.A.	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	-	0	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	DISHUB		
			15. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	4.500.000.000	20%	4.500.000.000	DISHUB		
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	4.500.000.000	20%	4.500.000.000	DISHUB		
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	DISHUB		
			16. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai				Persentase penurunan angka kecelakaan kapal di Kawasan Strategis Industri Sadai	N.A.	0	0%	-	0%	-	7%	450.000.000	10%	2.800.000.000	0%	-	17%	3.250.000.000	DISHUB		
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	N.A.	0	0%	-	0%	-	7%	450.000.000	10%	2.800.000.000	0%	-	17%	3.250.000.000	DISHUB		
						SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategis Industri Sadai	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	-	0	2 dokumen	450.000.000	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DISHUB		
						Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategis Industri Sadai	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	3 unit	2.800.000.000	-	0	3 unit	2.800.000.000	DISHUB		

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun												
										2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			17. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu				Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	N.A.	0	0%	-	0%	-	30%	780.000.000	30%	750.000.000	30%	780.000.000	90%	2.310.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN LAUT		Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	N.A.	0	0%	-	0%	-	30%	780.000.000	30%	750.000.000	30%	780.000.000	90%	2.310.000.000	DISHUB
						Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Jumlah Dokumen Study Kelayakan/Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	N.A.	0	-	0	-	0	1 Dokumen	780.000.000	-	0	-	0	1 Dokumen	780.000.000	DISHUB
						Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	750.000.000	-	0	2 Dokumen	750.000.000	DISHUB
						Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	N.A.	0	-	0	-	0				1 Dokumen	780.000.000	1 Dokumen	780.000.000	DISHUB	
		4. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.					Persentase Besarnya PAD dan Kontribusi PAD secara Keseluruhan	N.A.	0	0%	-	10%	640.000.000	10%	800.000.000	20%	87.500.000.000	0%	-	40%	88.940.000.000	DISHUB
			18. Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan				Persentase Pendapatan daerah dari Pengelolaan Bandara Depati Amir	N.A.	0	0%	-	10%	640.000.000	10%	800.000.000	20%	87.500.000.000	0%	-	40%	88.940.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN		Prosentase pertambahan pendapatan dari pengolahan perhubungan udara	N.A.	0	-	-	10%	640.000.000	10%	800.000.000	20%	87.500.000.000	0%	-	40%	88.940.000.000	DISHUB
						Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	N.A.	0	-	0	1 Dok	400.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dok	400.000.000	DISHUB
						DED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.	Jumlah Dokumen DED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.	N.A.	0	-	0	-	0	1 Dok	800.000.000	-	0	-	0	1 Dok	800.000.000	DISHUB
						Pembebasan lahan daerah komersil di bandara depati amir pangkalpinang	Jumlah pengadaan lahan daerah komersil di bandara depati amir pangkalpinang.	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	25 Ha	87.500.000.000	-	0	25 Ha	87.500.000.000	DISHUB
						Pembuatan papan reklame di area gedung VIP bandara depati amir pangkalpinang	Jumlah unit papan reklame di area gedung VIP bandara depati amir pangkalpinang yang dibangun	N.A.	0	-	0	3 Unit	240.000.000	-	0	-	0	-	0	3 Unit	240.000.000	DISHUB
		5. Mewujudkan kelancaran arus keluar masuk barang melalui pelabuhan untuk menurunkan angka inflasi.					Persentase penurunan angka inflasi di sektor perhubungan laut.	N.A.	0	2%	809.621.000	3%	2.000.000.000	3%	1.000.000.000	0%	-	0%	-	3%	3.809.621.000	DISHUB
			19. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam				Persentase kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam yang terlaksana.	N.A.	0	10%	809.621.000	20%	2.000.000.000	30%	1.000.000.000	0%	-	0%	-	60%	3.809.621.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT		Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal			10%	809.621.000	20%	2.000.000.000	30%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	70%	5.809.621.000	DISHUB

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun												
										2018		2019		2020		2021		2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Pangkal Balam	N.A.	0	1 Dokumen	809.621.000	-	0	-	0	-	0	0	0	1 Dokumen	809.621.000	DISHUB
						Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	N.A.	0	-	0	2 Dokumen	2.000.000.000	-	0	-	0	0	0	2 Dokumen	2.000.000.000	DISHUB
						Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	N.A.	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	-	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	DISHUB
	2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;																					
		6. Mewujudkan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang optimal sebagai penunjang konektivitas					Persentase pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan yang terbagun dan terpelihara.	65%	0	0%	0	20%	780.000.000	40%	4.653.600.000	10%	390.000.000	10%	300.000.000			DISHUB
		20. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut					Persentase peningkatan kondisi pelabuhan/ dermaga yang layak dalam mendukung konektivitas	65%	0	0%	-	20%	780.000.000	40%	4.653.600.000	10%	390.000.000	0%	300.000.000	70%	6.123.600.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	N.A.	0	-	-	20%	780.000.000	40%	4.653.600.000	10%	390.000.000	10%	300.000.000	80%	6.123.600.000	DISHUB
						Pemeliharaan pelabuhan/dermaga	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang dipelihara	N.A.	0	-	0	-	0	-	0	0	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	DISHUB	
						Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara	2 unit	214.270	-	0	3 unit (S.Selan)	780.000.000	6 unit (3 unit di tg.sangkar) dan (3 unit tg.labu)	1.653.600.000	1 unit (Nelayan Jelitik)	390.000.000	-	0	10 Unit	2.823.600.000	DISHUB
						Rehabilitas Pelabuhan/ dermaga	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang direhab	-	0	-	0	-	0	1 unit	3.000.000.000	-	0	-	0	1 unit	3.000.000.000	DISHUB
		7. Mewujudkan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal yang optimal sebagai penunjang konektivitas.					Persentase pembangunan sarana dan prasarana terminal type-B			5%	966.446.000	5%	2.650.000.000	5%	2.135.000.000	5%	2.423.500.000	5%	36.465.850.000	25%	44.640.796.000	DISHUB
			21. Meningkatnya konektivitas perhubungan darat				Persentase peningkatan jumlah penumpang moda angkutan darat.			5%	966.446.000	5%	2.650.000.000	5%	2.135.000.000	5%	2.423.500.000	5%	36.465.850.000	25%	44.640.796.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi			20%	966.446.000	20%	2.650.000.000	20%	2.135.000.000	20%	2.423.500.000	40%	36.465.850.000	100%	44.640.796.000	DISHUB
						Subsidi Angkutan Perintis	Jumlah trayek yang disubsidi	-	0	-	0	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	8 trayek	4.000.000.000	DISHUB
						Review Tataan Transportasi Wilayah (Tatrawi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Tatrawil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	0	1 dokumen	947.802.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	947.802.000	DISHUB
						Survey Kebutuhan Angkutan Umum.	Jumlah Dokumen Survey Kebutuhan Angkutan Umum	-	0	-	0	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	385.000.000	1 dokumen	423.500.000	1 dokumen	465.850.000	4 dokumen	1.624.350.000	DISHUB
						Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	-	0	-	0	1 Dokumen	650.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	650.000.000	DISHUB
						DED Pembangunan Terminal Type B	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Terminal Type B	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	750.000.000	-	0	-	0	1 Dokumen	750.000.000	DISHUB
						Kajian Lingkungan Pembangunan Terminal Type B	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Terminal Type B								1 Dokumen	1.000.000.000						

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab	
									Tahun													
									2018		2019		2020		2021		2022					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Pembangunan Terminal type-B	Jumlah pembangunan terminal type-B	-		0	-	0	-	0	-	0	1 unit	35.000.000.000	4 kegiatan	35.000.000.000	DISHUB	
						Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	-		0	-	0	1 dokumen	650.000.000					1 Dokumen	650.000.000	DISHUB	
		8. Mewujudkan Bandara Depati Amir sebagai Bandara Internasional					Status Internasional Bandara Depati Amir			40%	10.789.880.000	30%	35.000.000.000	30%	39.300.000.000	-	-	-	100%	85.089.880.000	DISHUB	
			22. Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir				Persentase Perjanjian Kerjasama yang terealisasi			40%	10.789.880.000	30%	35.000.000.000	30%	39.300.000.000	-	-	-	100%	85.089.880.000	DISHUB	
					PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL, DAN KEBANDARUDARAAN		Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi.			40%	10.789.880.000	30%	35.000.000.000	30%	39.300.000.000	0%	-	0%	100%	85.089.880.000	DISHUB	
						Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Appraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan Bandara Depati Amir	-		0	1 Dok	205.695.000	-	0	-	0	0	0	1 Dok	205.695.000	DISHUB	
						Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Panjang jalan akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir yang terbangun	-		0	900 m	6.409.200.000	-	0	-	0	0	0	900 m	6.409.200.000	DISHUB	
						Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik Ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	-		0	1 Paket	646.150.000	-	0	-	0	0	0	1 paket	646.150.000	DISHUB	
						Pengadaan Tanah untuk Pengembangan di Bandara Depati Amir	Luas Tanah yang dibebaskan	-		0	-	0	10 Ha	35.000.000.000	5 Ha	17.500.000.000			15 Ha	52.500.000.000	DISHUB	
						Pengadaan dan pemasangan jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah panjang jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	-		0	1 Paket	215.635.000	-	0	-	0	0	0	1 Paket	215.635.000	DISHUB	
						Pengadaan dan Pemasangan X-Ray, Walkthrough dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir.	Jumlah unit X-Ray, Walkthrough dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir	-		0	1 Paket	2.500.000.000	-	0	-	0	0	0	1 paket	2.500.000.000	DISHUB	
						Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	-		0	900 M	813.200.000	-	0	-	0	0	0	1200 m	813.200.000	DISHUB	
						DED gedung VIP di Bandara hanajoedin Belitung	Jumlah Dokumen DED gedung VIP di Bandara hanajoedin Belitung	-		0	-	0	0	1 Dok	800.000.000				1 Dok	800.000.000	DISHUB	
						Pembangunan gedung VIP di bandara hanajoedin Belitung	Jumlah unit Pembangunan gedung VIP di bandara hanajoedin Belitung	-		0	-	0	0	100%	21.000.000.000	-	0	0	100%	21.000.000.000	DISHUB	
	3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;																					
		9. Meningkatkan kontribusi perhubungan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan					Persentase kontribusi perhubungan sebagai pendukung sektor pendidikan			-	0	30%	12.850.000.000	30%	15.360.000.000	30%	16.870.000.000	10%	890.000.000	100%	45.970.000.000	DISHUB
			23. Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan				Porcentage Sarana dan Prasana Perhubungan yang terbangun dalam mendukung pendidikan			0%	0	30%	12.850.000.000	30%	15.360.000.000	30%	16.870.000.000	10%	890.000.000	100%	45.970.000.000	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT		Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid			0%	-	5%	12.850.000.000	7%	15.360.000.000	10%	16.870.000.000	12%	890.000.000	23%	45.970.000.000	DISHUB
						Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah	-		0	0	16 unit	12.000.000.000	18 unit	14.500.000.000	19 unit	16.000.000.000	-	0	53 unit	42.500.000.000	DISHUB

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab	
									Tahun													
									2018		2019		2020		2021		2022					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	Jumlah unit Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	-	0	0%	0	2 unit	850.000.000	2 unit	860.000.000	2 unit	870.000.000	2 unit	890.000.000	8 unit	3.470.000.000	DISHUB
	4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;																					
		10. Mewujudkan Transportasi yang berkualitas sebagai pendukung Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan					Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak	267		2,62%	6.595.331.200	3,20%	20.499.090.425	3,72%	21.601.359.389	4,29%	24.514.263.417	4,93%	25.151.450.000	4,9%	98.361.494.431	DISHUB
			24. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi	267		2,62%	6.595.331.200	3,20%	20.499.090.425	3,72%	21.601.359.389	4,29%	24.514.263.417	4,93%	25.151.450.000	4,9%	98.361.494.431	DISHUB
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT		Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	267		2,62%	5.969.561.200	3,20%	20.499.090.425	3,72%	21.601.359.389	4,29%	24.514.263.417	4,93%	25.151.450.000	4,9%	97.735.724.431	DISHUB
						Study Identifikasi Daerah Rawah Kecelakaan di Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Study Identifikasi Daerah Rawah Kecelakaan di Jalan Provinsi	-	0	-	0	1 dokumen	950.000.000	-	0	-	0	1 dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	2.100.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIIL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Pulau Bangka	2.126 m guardrail, 1.113 bh rambu lalin, 2 unit APIIL, 4 unit WL, 860 bh deliniator, 50.906 m2 marka	17.564.242.800	20%	2.095.244.000	20%	3.578.000.000	20%	4.144.000.000	20%	4.765.600.000	20%	5.480.440.000	100%	20.063.284.000	DISHUB
							Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIIL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Pulau Belitung	1.376 m guardrail, 1.809 paku jalan, 1 lokasi apilil, 13 lokasi wl, 1.940 bh deliniator, 58.156 m2 marka jalan, 848 bh rambu-rambu	5.384.265.500	-	0	20%	3.000.000.000	20%	3.300.000.000	20%	3.630.000.000	20%	3.993.000.000	80%	13.923.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	101 unit lpu	3.959.808.000	210 unit	2.610.488.000	250 unit	7.967.486.425	250 unit	9.162.609.389	250 unit	12.117.550.917	250 unit	13.329.306.000	1.210 unit	45.187.440.731	DISHUB
						Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	70%	677.927.000	75%	778.380.000	80%	1.238.578.000	85%	1.489.000.000	88%	1.712.000.000	90%	1.968.800.000	90%	7.186.758.000	DISHUB
						Pengadaan Alat-Alat Berat Operasional	Jumlah unit Alat Berat	-	0	-	0	1 unit Sky Lift	1.648.718.100	1 unit derek	1.300.000.000					2 unit	2.948.718.100	DISHUB
						Penyuluhan Keselamatan dan Keterliban Berlalu lintas	Penyuluhan Keselamatan dan Keterliban Berlalu lintas	480 orang	317.196.300	-	0	160 orang	185.000.000	160 orang	185.000.000	160 orang	185.000.000	160 orang	185.000.000	640 orang	740.000.000	DISHUB
						Pengadaan dan Pemasangan Biboard Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah unit Pengadaan dan Pemasangan Biboard Keselamatan Lalu Lintas	-	0	-	0	28 unit	560.000.000	28 unit	560.000.000	28 unit	560.000.000	-	0	84 unit	1.680.000.000	DISHUB
						Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone	Jumlah Road Barrier dan Traffic Cone		0	70 buah	44.064.000						120 buah	72.550.000	190 buah	116.614.000	DISHUB	
						Pengadaan Peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan	-	0	1 paket	136.350.700	-	0	-	0	-	0	1 paket	258.000.000	2 paket	394.350.700	DISHUB
						Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	-	0	-	0	25 Orang	175.000.000	25 Orang	185.000.000	25 Orang	195.000.000	25 Orang	205.000.000	4 kegiatan	760.000.000	DISHUB
						Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	Jumlah Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	-	0	1 dokumen	625.770.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	625.770.000	DISHUB

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program Perangkat Daerah	Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Akhir		PD yang Bertanggung Jawab
										Tahun														
										2018		2019		2020		2021		2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Peserta Pekan Keselamatan di 7 Kabupten Kota	-	0	-	0	500 orang	700.000.000	500 orang	700.000.000	500 orang	700.000.000	500 orang	500.000.000	2000 orang	2.600.000.000	DISHUB		
						Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudir/ Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah Peserta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudir/ Awak Kendaraan Umum Teladan	70 orang	481.069.600	14 orang	87.890.000	14 orang	100.000.000	14 orang	120.000.000	14 orang	125.000.000	14 orang	150.000.000	70 orang	582.890.000	DISHUB		
						Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	120 orang	454.799.000	30 orang	110.398.500	30 orang	185.000.000	30 orang	212.750.000	30 orang	244.662.500	30 orang	281.370.000	150 orang	1.034.181.000	DISHUB		
						Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha	2 kab/kota	771.373.154	4 kab/ kota	94.400.000	4 kab/ kota	211.307.900	7 kab/ kota	243.000.000	7 kab/ kota	279.450.000	7 kab/ kota	322.000.000	7 Kab/ Kota	1.150.157.900	DISHUB		
	6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;																							
		11. Mewujudkan Tranportasi yang berkualitas sebagai pendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	25. Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.				Prosentase kontribusi sektor perhubungan terhadap Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	7%	0	10%	804.422.000	14%	2.947.959.000	11%	3.198.853.850	17%	957.382.928	18%	1.024.688.500	18%	8.933.306.278	DISHUB		
							Persentase Peningkatan Kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.	7%	0	10%	331.528.000	14%	2.872.959.000	11%	3.133.853.850	17%	897.382.928	18%	969.688.500	70%	8.205.412.278	DISHUB		
					PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PERHUBUNGAN DARAT		Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	7%	0	7%	68.718.000	8%	2.347.000.000	9%	2.584.050.000	10%	326.657.500	11%	375.655.500	11%	5.702.081.000	DISHUB		
						Peningkatan Peralatan Automatic Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pemasangan ATCS	3 lokasi	3.000.000.000	-	0	2 lokasi	2.100.000.000	2 lokasi	2.300.000.000					4 lokasi	4.400.000.000	DISHUB		
						Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	-	0	4 Dokumen	68.718.000	4 Dokumen	115.000.000	4 Dokumen	132.250.000	4 Dokumen	152.087.500	4 Dokumen	174.900.000	20 Rekomendasi	642.955.500	DISHUB		
						Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	0	-	0	3 dokumen	132.000.000	3 dokumen	151.800.000	3 dokumen	174.570.000	3 dokumen	200.755.500	12 dokumen	659.125.500	DISHUB		
					PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN		Prosentase Angkutan Umum yang laik jalan			15%	262.810.000	15%	525.959.000	15%	549.803.850	15%	570.725.428	15%	594.033.000	75%	2.503.331.278	DISHUB		
						Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Angkutan Umum yang diperiksa terkait surat-surat kendaraan, Penimbangan Muatan dan pengukuran dimensi kendaraan	1.200 unit	454.696.899	600 unit	141.140.000	600 unit	208.660.000	600 unit	208.660.000	600 unit	208.660.000	600 unit	208.660.000	3.000 unit	975.780.000	DISHUB		
						Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Jumlah hari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada Hari Besar Keagamaan.	3 hari	249.330.000	3 hari	68.480.000	3 hari	75.000.000	3 hari	85.000.000	3 hari	90.000.000	3 hari	95.000.000	3 hari	413.480.000	DISHUB		
						Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	0	1 dokumen	53.190.000	1 dokumen	92.299.000	1 dokumen	106.143.850	1 dokumen	122.065.428	1 dokumen	140.373.000	5 laporan	514.071.278	DISHUB		
						Pengendalian dan Pengawasan Angkutan pada hari-hari peringatan daerah dan nasional.	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada hari-hari peringatan daerah dan nasional.	-	0	-	0	15 kali	150.000.000	15 kali	150.000.000	15 kali	150.000.000	15 kali	150.000.000	60 kali	600.000.000	DISHUB		

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Pada BAB ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K		0%	25%	25%	25%	25%	100%
2	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan		20%	10%	30%	20%	15%	95%
3	Meningkatnya mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata		0	14%	29%	20%	15%	64%
4	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas		0%	20%	20%	0%	0%	20%

	timur Pulau Bangka							
5	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang		0%	10%	10%	8%	15%	15%
6	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok		0%	20%	20%	30%	30%	30%
7	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba		0%	10%	10%	15%	15%	15%
8	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung		0%	15%	15%	25%	25%	25%
9	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing		0%	5%	5%	10%	10%	10%
10	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		0%	0%	4%	5%	7%	16%
11	Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk		5%	20%	25%	25%	25%	100%
12	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular		0%	5%	7%	9%	12%	12%
13	Meningkatnya		0%	0%	0%	10%	20%	30%

	kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)							
14	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat		0%	10%	10%	0%	0%	20%
15	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat		0%	0%	0%	0%	20%	20%
16	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai		0%	0%	7%	10%	0%	10%
17	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu		0%	0%	30%	30%	30%	90%
18	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan		0%	10%	10%	20%	0%	20%
19	Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam		10%	20%	30%	0%	0%	60%
20	Meningkatnya konektivitas perhubungan laut		0%	20%	40%	10%	10%	80%
21	Meningkatnya		5%	5%	5%	5%	5%	25%

	konektivitas perhubungan darat							
22	Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir		40%	30%	30%			100%
23	Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan		0%	30%	30%	30%	10%	100%
24	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi		2,62%	3,20%	3,72%	4,29%	4,93%	4,93%
25	Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat.		10%	14%	11%	17%	18%	70%

BAB VIII

PENUTUP

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 merupakan Komitmen Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 merupakan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang nantinya akan dipakai sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan pada tahun-tahun berikutnya.
3. Hal – hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait lainnya.
4. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 hendaknya dijalankan dengan penuh dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun sebagai Implementasi Kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang Perhubungan, secara bertahap sesuai

dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan Kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Nopember 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Ir. SARJULIANTO, Dipl, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19580710 198603 1 007

Vid	Mdi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal	Unggulan Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Tahun						
									2018		2019		2020		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Labat Sigihitren, Provinsi Maja yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		10,00%	1.902.000.000	17,50%	1.794.486.200	27,50%	6.864.686.220	22,50%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		0,00%	1.902.000.000	30,00%	450.000.000	0,00%	2.800.000.000	30,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		0,00%	-	20,00%	450.000.000	60,00%	2.800.000.000	0,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		0,00%	-	0,00%	-	20,00%	462.500.000	60,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	20,00%	1.650.000.000	30,00%	3.440.000.000	20,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	20,00%	1.200.000.000	30,00%	2.300.000.000	0,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	0,00%	-	50,00%	462.500.000	50,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	20,00%	2.257.581.000	10,00%	2.000.000.000	10,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	10,00%	400.000.000	20,00%	700.000.000	10,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	10,00%	5.500.000.000	10,00%	5.500.000.000	-
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	10,00%	5.500.000.000	10,00%	5.500.000.000	0,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	10,00%	5.000.000.000	12,00%	5.390.000.000	15,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	20,00%	2.257.000.000	20,00%	2.257.000.000	30,00%
	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB		3 PENGEMBANGAN PARAWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%	-	10,00%	1.570.000.000	10,00%	1.570.000.000	15,00%

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Energi Awal	Unggulan Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Energi Awal	Tahun						
									2018		2019		2020		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR		3. PENGEMBANGAN PARIWISATA	3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3. jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		0,00%		- 15,00%	1.780.000.000	15,00%	1.780.000.000	25,00%
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR		3. PENGEMBANGAN PARIWISATA	3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3. jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	-	-	5,00%	1.200.000.000	5,00%	1.200.000.000	10,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR		3. PENGEMBANGAN PARIWISATA	3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3. jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	-	-	-	-	4,00%	462.500.000	5,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR		3. PENGEMBANGAN PARIWISATA	3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3. jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	5,00%	500.000.000	20,00%	4.500.000.000	25,00%	8.520.000.000	25,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR												
	2. Mengajukan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;	2. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi ekonomi	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi		7. PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR	14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah									
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	5,00%	450.000.000	7,00%	2.800.000.000	9,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	10,00%	1.400.000.000	10,00%	1.000.000.000	0,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	0,00%	-	7,00%	450.000.000	10,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDR			5. Meningkatnya pembangunan pariwisata industri	5. Persentase Pertumbuhan Produk sektor industri pengolahan	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	780.000.000	30,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	2. Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Penghasilan pemerintah perkapita		9. PENGUATAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH	7. Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	14. Persentase pertumbuhan pengalokasian pemerintah daerah	-	-	10,00%	640.000.000	10,00%	800.000.000	20,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	2. Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Penghasilan pemerintah perkapita		9. PENGUATAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH	7. Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	15. Persentase pertumbuhan pengalokasian pemerintah daerah	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;	2. Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pengapatan perkapita Masyarakat		10. Menurunnya angka inflasi	10. Angka Inflasi Provinsi Kabupaten Bantul		10,00%	809.621.000	20,00%	2.000.000.000	30,00%	1.000.000.000	10,00%	
	2. Mengajukan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;	2. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi		7. PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR	14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	14. Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut	-	-	-	780.000.000	1 unit	4.653.000.000	-	

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal	Unggahan Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Tahun						
									2018		2019		2020		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

LEMBAR KERJA RPJMD

LEMBAR KERJA RENCANA

2021		2022		Kondisi Kinerja Awal	Strategi	Kode			Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Tujuan Rencana	Indikator Tujuan Rencana	Kondisi Awal Rencana		
Rp	Target		Rp											Target	
4.254.779.842	20,00%		1.854.702.579		4 Meningkatkan pengendalian dan pengalasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					11 Penguatan dan pemanfaatan tata ruang laut serta pengalasan pendukung urusan kelautan dan perikanan	1 Meningkatkan kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor perikanan	N.A.	10,00%	
-	0,00%		-	60,00%	5 Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan Perikanan					17 Pengembangan kawasan Strategis Kepulauan Lepas Pungka					
-	0,00%		-	100,00%	6 Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan Perikanan					18 Pengembangan kawasan Strategis etabek Perikanan Selat Nipah					
2.930.000.000	0,00%		-	100%	6 Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan Perikanan					19 Pengembangan kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga					
402.500.000	60,00%		2.930.000.000	100%	6 Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan Perikanan					20 Pengembangan kawasan Pedesaan Kepulauan Manggar					
2.560.000.000	30,00%		14.560.000.000	50,00%	7 Meningkatkan sinergitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata					22 Penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	2 Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor pariwisata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi Perhubungan pada sektor pariwisata	N.A.	1%	
-	0,00%		-	100,00%	7 Meningkatkan sinergitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata					22 Penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.					
2.930.000.000	0,00%		-	100,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					26 Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kallan					
2.300.000.000	10,00%		2.900.000.000	0,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					28 Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kallan					
1.000.000.000	30,00%		2.900.000.000	70,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					29 Pengembangan kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang					
-	-		-	20,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					30 Pengembangan Kawasan Perorutakan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka					
-	0,00%		-	20,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					31 Pengembangan kawasan Perorutakan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Kelayang					
3.430.000.000	20,00%		3.993.000.000	20,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					32 Pengembangan Kawasan Perorutakan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Kelayang					
2.800.000.000	30,00%		2.800.000.000	30,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					32 Pengembangan kawasan Perorutakan Pariwisata Kawasan Kota Tas Mambak					
1.800.000.000	15,00%		1.800.000.000	40,00%	9 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					33 Pengembangan Kawasan Perorutakan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Sempang Benda					

2021		2022		Kondisi Kinerja Awal	Strategi	Kode			Program Pembangunan daerah	Arah Kebijakan	Tujuan Rencana	Indikator Tujuan Rencana	Kondisi Awal Rencana		
No	Target	No	Target	No										Target	
2.200.000.000	25,0%	2.200.000.000	40,0%	9	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					34 Pengembangan kawasan perputokan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung					
1.750.000.000	10,0%	1.750.000.000	40,0%	9	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata					35 Pengembangan Kawasan Perputokan Pariwisata Gunung Meruumbong					
2.800.000.000	7,00%	2.800.000.000	80,0%	10	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan					36 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangko dengan pulau Sumatera					
1.800.000.000	25,0%	45.580.000.000	100,0%	10	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan					37 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangko dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil					
-	12,00%	-	12,00%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					42 Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPIT) Tanjung Ular	3	Meningkatkan kontribusi perhubungan pada sektor industri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi Perhubungan pada sub sektor industri		-
760.000.000	20,0%	760.000.000	30,0%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					44 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kela (PAK)					
-	0,00%	-	20,00%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					46 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat					
-	20,00%	4.500.000.000	20,00%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					48 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat					
2.800.000.000	0,00%	-	10,00%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					46 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sada					
750.000.000	30,0%	780.000.000	90,0%		Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah					47 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu di Teluk Kabaai Bengkulu					
07.500.000.000	-	-	20,00%		Meningkatkan pendapatan asli daerah					50 Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi perkembangan masyarakat.	4	Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.	Persentase Besarnya PAD dan kontribusi PAD secara keseluruhan		0%
	0,00%	-	0,00%		Meningkatkan pendapatan asli daerah										
-	-	-	70,00%		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi					55 Pengendalian Tingkat Harga-Harga komoditas pengumbaran inflasi	0	Mewujudkan kelancaran arus keluar masuk barang melalui kebutuhan untuk memonitoring angka inflasi.	Persentase penurunan angka inflasi di sektor perhubungan laut.	N/A	10%
380.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit		Meningkatkan dan mengembangkan kemitraitas perhubungan laut					60 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung perhubungan	0	Mewujudkan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung perhubungan yang optimal sebagai penunjang konektivitas	Persentase pelabuhan serta sarana prasarana pendukung perhubungan yang telah terbangun dari terpelihara.	10%	0%

			Kondisi Kinerja Awal	Strategi	Kode			Program Pembangunan daerah	Arah Kebijakan	Tujuan Rencana	Indikator Tujuan Rencana	Kondisi Awal Rencana	
2021	2022												
Rp	Target	Rp											Target

Tahun										Kondisi Awal Rencana	Sasaran Rencana	Indikator Sasaran Rencana	Kondisi Awal Rencana	Tahun										Kondisi Akhir Rencana	Strategi Rencana	Arah Kebijakan Rencana	Program Perangkit Dampak	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Bidang Usulan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Strategi Perencanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2018		2019		2020		2021		2022						2018		2019		2020		2021		2022									2018		2019		2020		2021		2022				
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Target Kinerja								Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target			
										8.	Menurunkan angka kecenderungan lalu lintas jalan Provinsi di Kawasan perbatasan Perbatasan Provinsi Sumatera Nasional Maritim Belitung	Pemenuhan Peruntukan Angka kecenderungan lalu lintas jalan di Kawasan Perbatasan Provinsi Sumatera Nasional Maritim Belitung	N.A.	0%	0	15%	1.780.000.000	15%	1.780.000.000	25%	2.200.000.000	25%	2.350.000.000	25%	2.350.000.000	25%	2.350.000.000	25%	2.350.000.000	40%													
										9.	Menurunkan angka kecenderungan lalu lintas jalan Provinsi di Kawasan Perbatasan Perbatasan Provinsi Sumatera Nasional Maritim Belitung	Pemenuhan Peruntukan Angka kecenderungan lalu lintas jalan di Kawasan Perbatasan Provinsi Sumatera Nasional Maritim Belitung	N.A.	0%	0	5%	1.200.000.000	5%	1.200.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	40%													
										10.	Meningkatnya keselamatan Pelayaran di Kawasan Perbatasan Perbatasan Provinsi Sumatera	Pemenuhan peruntukan angka keselamatan kapal di Kawasan Perbatasan Provinsi Sumatera	N.A.	0%	0	0%	0	4%	482.500.000	5%	2.800.000.000	7%	2.900.000.000	18%	2.900.000.000	18%	2.900.000.000	7%	2.900.000.000	80%													
										11.	Meningkatnya keselamatan antar pulau bangsa dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk	Pemenuhan antar pulau-pulau berpenduduk yang terlokasi di Kawasan Perbatasan Provinsi Sumatera	N.A.	5%	300.000.000	20%	4.500.000.000	25%	8.520.000.000	25%	9.800.000.000	25%	45.580.000.000	100%																			
																									</																		

Kegiatan Rencana	Indikator Kegiatan Rencana	Kondisi Awal Rencana	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Kondisi Akhir Akhir	PD yang Berpengaruh Jawab
			Tahun													
			2018		2019		2020		2021		2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Pengadaan dan Pemertagan Perencanaan jalan pada jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Persentase perolehanap jalan yang terpasang (Garat Real), Pulau Jalan, Alat Permen Isyarat Lalu Lintas(APHL), Lampu Peringatan (M.L) Delmar, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas, dan Lampu Peringatan jalan Unam menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	-	0	0	0	15%	1.780.000.000	15%	1.780.000.000	25%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	80%	1.960.000.000	DSP4.8
Pengadaan dan Pemertagan Perencanaan jalan pada jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Gunung Meruambing	Persentase jumlah perolehanap jalan yang terpasang (Garat Real), Pulau Jalan, Alat Permen Isyarat Lalu Lintas(APHL), Lampu Peringatan (M.L) Delmar, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas, dan Lampu Peringatan jalan Unam menuju Kawasan Pariwisata Gunung Meruambing	-	0	0	0	5%	1.200.000.000	5%	1.200.000.000	10%	1.750.000.000	10%	1.750.000.000	30%	5.900.000.000	DSP4.8
SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP) kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	0	0	2 dokumen	462.500.000	-	0	-	0	2 Dokumen	462.500.000	DSP4.8
Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP) kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	-	-	-	3 unit	2.800.000.000	3 unit	2.800.000.000	6 unit	5.700.000.000	DSP4.8
Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	-	0	1 Dokumen (P Gresek)	300.000.000	5 Dokumen (Isap, sekunt, sumedang, pulau betur dan pulau linau)	2.250.000.000	1 Dokumen (Isarjng tedung)	3.120.000.000	0	0	0	0	5 Dokumen	5.870.000.000	DSP4.8
Penyusunan SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	-	0	0	0	6 Dokumen (Laz, Gresek, Seku)	2.250.000.000	10 Dokumen (Isap, sekunt, sumedang, pulau betur dan pulau linau)	3.750.000.000	2 Dokumen (Isarjng tedung)	750.000.000	-	0	16 Dokumen	6.750.000.000	DSP4.8
Kajian lingkungan Pembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan PelabuhanDermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	-	0	0	0	0	0	3 Dokumen (Laz, Gresek, Seku)	1.650.000.000	5 Dokumen (Isap, sekunt, sumedang, pulau betur dan pulau linau)	2.850.000.000	1 Dokumen (Isarjng tedung)	580.000.000	8 Dokumen	5.980.000.000	DSP4.8
Pembangunan Pelabuhan Dermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil yang terbagian	Jumlah Pelabuhan Dermaga di kawasan konsektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil yang terbagian	-	0	0	0	0	0	0	0	1 unit (Gresek)	10.000.000.000	2 unit (Isar dan pulau betur)	22.000.000.000	3 unit	32.000.000.000	DSP4.8
Pengadaan Kapal Ro-Ro 200 GT	Jumlah unit kapal Ro-Ro yang dibangun	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	1 unit	45.000.000.000	1 unit	45.000.000.000	DSP4.8
SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	2 dokumen	450.000.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DSP4.8
Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	-	3 unit	2.800.000.000	-	-	-	-	3 unit	2.800.000.000	DSP4.8
Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	-	0	-	0	0	0	0	1 Dokumen	780.000.000	-	-	0	1 Dokumen	780.000.000	DSP4.8
Penyusunan SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	750.000.000	2 Dokumen	750.000.000	DSP4.8	
Penyusunan SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	-	0	-	0	1 Dokumen	1.400.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.400.000.000	DSP4.8
Kajian lingkungan Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	-	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	-	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	DSP4.8
Pengadaan dan Pemertagan Perencanaan jalan pada jalan Provinsi menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	Persentase perolehanap jalan yang terpasang (Garat Real), Pulau Jalan, Alat Permen Isyarat Lalu Lintas(APHL), Lampu Peringatan (M.L) Delmar, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas, dan Lampu Peringatan jalan Unam menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berkat	-	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	DSP4.8	
SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategis Industri Isale	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	0	0	2 dokumen	450.000.000	-	0	-	0	2 Dokumen	450.000.000	DSP4.8
Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategi Industri Sade	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Nangas Pelayaran (SBNP)	-	0	-	0	-	0	-	0	3 unit	2.800.000.000	-	0	3 unit	2.800.000.000	DSP4.8
Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan strategi Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan strategi Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	-	0	0	0	0	0	1 Dokumen	780.000.000	-	0	-	0	1 Dokumen	780.000.000	DSP4.8
Penyusunan SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan strategi Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan PelabuhanDermaga di Kawasan strategi Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	-	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	750.000.000	-	0	2 Dokumen	750.000.000	DSP4.8	
Pengadaan dan Pengembangan Pelabuhan Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan di Kawasan strategi Industri Terpadu di Teluk Klabat Belitung	-	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	780.000.000	1 Dokumen	780.000.000	DSP4.8		
Kelembagaan konsultasi Perbaikan/ Apresiasi Harpa Tanah untuk Pengembangan daerah komersil Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultasi Perbaikan/ Apresiasi Harpa Tanah untuk Pengembangan daerah komersil Bandara Depati Amir	-	0	0	0	1 Dok	400.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Dok	400.000.000	DSP4.8
OED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang	Jumlah Dokumen OED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang	-	0	0	0	0	0	1 Dok	800.000.000	-	0	-	0	1 Dok	800.000.000	DSP4.8
Pembinaan lahan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang	Jumlah pengisian lahan daerah komersil di bandara Depati Amir pangkalpinang	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DSP4.8
Pembinaan lahan komersil di area gedung VP bandara Depati Amir pangkalpinang	Jumlah unit pagar volume di area gedung VP bandara Depati Amir pangkalpinang yang dibangun	-	0	0	0	3 Unit	240.000.000	0	0	-	0	-	0	3 Unit	240.000.000	DSP4.8
Studi Kelayakan Penggali Pelabuhan Pangkal Balan	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Pangkal Balan	-	0	1 Dokumen	808.621.000	0	0	0	0	-	0	-	0	1 Dokumen	808.621.000	DSP4.8
Penyusunan SD dan OED Pembangunan PelabuhanPenggali Pelabuhan Pangkal Balan	Jumlah Dokumen SD dan OED Pembangunan PelabuhanPenggali Pelabuhan Pangkal Balan	-	0	-	0	2 Dokumen	2.000.000.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	2.000.000.000	DSP4.8
Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan PelabuhanPenggali Pelabuhan Pangkal Balan	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan PelabuhanPenggali Pelabuhan Pangkal Balan	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	-	0	-	0	1 Dokumen	1.000.000.000	DSP4.8
Perencanaan pelabuhan/dermaga yang dipertahra	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang dipertahra	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	DSP4.8

Kegiatan Rencma	Indikator Kegiatan Rencma	Kondisi Awal Rencma	Capaian Kinerja Program dan Tenaga Pendanaan												Kondisi Akhir Akhir	PD yang Bertanggung Jawab	
			Tahun														
			2018		2019		2020		2021		2022						
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Pemeliharaan Sarana Saran Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Sarana Saran Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara	2 unit	214.279	-	0	3 unit (3-Selan)	780.000.000	-	0	1.653.000.000	3 unit (kayak antik 19 panjang dan 2 unit 19 lebar)	390.000.000	0	10 unit	2.823.000.000	DISHUB	
Rehabilitasi Pelabuhan/ dermaga yang rusak	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang rusak	0	0	0	0	0	1 unit	3.000.000.000	0	0	0	0	0	1 unit	3.000.000.000	DISHUB	
Subsidi Angkutan Perintis	Jumlah trayek yang disubsidi	0	-	0	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	2 trayek	1.000.000.000	8 trayek	4.000.000.000	DISHUB
Revisi Tataatan Transportasi Wilayah (Tatrans) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Tataatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	1 dokumen	966.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	966.480.000	DISHUB	
Survey Kebutuhan Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Survey Kebutuhan Angkutan Umum	0	0	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	385.000.000	1 dokumen	423.500.000	1 dokumen	465.850.000	4 dokumen	1.624.350.000	4 dokumen	1.624.350.000	DISHUB	
Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	0	0	1 Dokumen	650.000.000	-	0	0	0	0	-	0	1 Dokumen	650.000.000	DISHUB		
DED Pembangunan Terminal Type B	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Terminal Type B	0	0	-	0	1 Dokumen	750.000.000	-	0	0	-	0	1 Dokumen	750.000.000	DISHUB		
Kajian Lingkungan Pembangunan Terminal Type B	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Terminal Type B							1 Dokumen	1.000.000.000								
Pembangunan Terminal type-B	Jumlah pembangunan terminal type-B	0	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	35.000.000.000	4 kegiatan	35.000.000.000	4 kegiatan	35.000.000.000	DISHUB	
Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	0	0	1 dokumen	650.000.000								1 Dokumen	650.000.000	DISHUB		
Pelebaran konsultasi Pembahasan/ Approval Pembangunan Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultasi Pembahasan/ Approval Pengajuan Tanah untuk Pengembangan Bandara Depati Amir	0	1 Dok	205.695.000	-	0	0	0	0	0	0	0	1 Dok	205.695.000	DISHUB		
Pelengkapan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Pelengkapan jalan akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir yang terbangun	0	900 m	6.409.200.000									900 m	6.409.200.000	DISHUB		
Pengadaan dan Pemecangan Garis dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemecangan Garis dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	0	1 Paket	646.150.000									1 paket	646.150.000	DISHUB		
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan di Bandara Depati Amir	Luas Tanah yang dibutuhkan	0	0	10 Ha	35.000.000.000	10 Ha	17.500.000.000						15 Ha	52.500.000.000	DISHUB		
Pengadaan dan pemecangan jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah panjang jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	0	1 Paket	215.635.000									1 Paket	215.635.000	DISHUB		
Pengadaan dan Pemecangan X-Ray Walkthrough dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah unit X-Ray Walkthrough dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir	0	1 Paket	2.500.000.000									1 paket	2.500.000.000	DISHUB		
Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	0	900 M	833.300.000									1200 m	833.300.000	DISHUB		
DED gedung VIP di Bandara harsjadipin Belitung	Jumlah Dokumen DED gedung VIP di Bandara harsjadipin Belitung	0	0	0	1 Dok	800.000.000							1 Dok	800.000.000	DISHUB		
Pembangunan gedung VIP di bandara harsjadipin Belitung	Jumlah unit Pembangunan gedung VIP di bandara harsjadipin Belitung	0	0	0	0	100%	21.000.000.000		0	0	100%	21.000.000.000	0	100%	21.000.000.000	DISHUB	
Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah	0	0	16 unit	12.000.000.000	16 unit	14.500.000.000	16 unit	16.000.000.000				0	53 unit	42.500.000.000	DISHUB	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSSS) di Jalan Provinsi	Jumlah unit Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSSS) di Jalan Provinsi	0	0	2 unit	860.000.000	2 unit	860.000.000	2 unit	870.000.000	2 unit	860.000.000	8 unit	3.470.000.000	8 unit	3.470.000.000	DISHUB	
Study Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Study Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	0	0	0	1 dokumen	950.000.000	-	0	0	0	1 dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	2.100.000.000	DISHUB		
Pengadaan dan Pemecangan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pemecahan perengkapan jalan yang terpasang (Signad Road), Palis jalan, Alat Pembari Isyarat Lalu Lintas(APLL), Lampu Peringatan (MK), Detektor, Marka Jalan, Garis rembu, lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (PJAJ) di Pulau Bangka	17.564.242.800	20%	2.085.244.000	20%	3.376.000.000	20%	4.144.000.000	20%	4.785.600.000	20%	5.485.440.000	100%	20.063.284.000	DISHUB		
	Pemecahan perengkapan jalan yang terpasang (Signad Road), Palis jalan, Alat Pembari Isyarat Lalu Lintas(APLL), Lampu Peringatan (MK), Detektor, Marka Jalan, Garis rembu, lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (PJAJ) di Pulau Belitung	5.384.365.500	-	0	20%	3.000.000.000	20%	3.300.000.000	20%	3.630.000.000	20%	3.960.000.000	90%	13.923.000.000	DISHUB		
Pengadaan dan Pemecangan Lampu/Penerangan Jalan Umum (PJAJ)	Jumlah Pengadaan dan Pemecangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJAJ)	101 unit tipo	3.899.869.000	250 unit	2.630.488.000	250 unit	7.967.486.425	250 unit	5.162.669.389	250 unit	12.117.550.917	250 unit	10.985.290.000	1.210 unit	42.443.024.731	DISHUB	
Pemeliharaan Asin Kelembatan Transportasi	Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam kondisi baik	70%	677.927.000	70%	778.380.000	80%	1.238.578.000	80%	1.488.000.000	80%	1.712.000.000	90%	1.968.800.000	90%	7.186.758.000	DISHUB	
Pengadaan Alat-Alat Berat Operasional	Jumlah unit Alat Berat	0	-	0	1 unit Sky Lift	1.648.718.100	1 unit derek	1.300.000.000					2 unit	2.948.718.100	DISHUB		
Penyediaan Keselamatan dan Ketertiban Beraku Iras	Penyediaan Keselamatan dan ketertiban Beraku Iras	480 orang	317.398.300	-	0	100 orang	185.000.000	100 orang	185.000.000	100 orang	185.000.000	100 orang	185.000.000	480 orang	740.000.000	DISHUB	
Pengadaan dan Pemecangan Board keselamatan Lalu Lintas	Jumlah unit Pengadaan dan Pemecangan Board keselamatan Lalu Lintas	0	0	0	28 unit	560.000.000	28 unit	560.000.000	28 unit	560.000.000			28 unit	1.680.000.000	DISHUB		
Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone	Jumlah Road Barrier dan Traffic Cone	0	70 buah	44.664.000								120 buah	72.550.000	190 buah	118.614.000	DISHUB	
Pengadaan Perabotan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perabotan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan	0	1 paket	136.300.700	-	0	0	0	0	0	1 paket	258.000.000	2 paket	394.300.700	DISHUB		
Penyenggaraan Bimbingan Teknis Perengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perengkapan Keselamatan Lalu Lintas	0	0	25 Orang	175.000.000	25 Orang	185.000.000	25 Orang	195.000.000	25 Orang	205.000.000	4 kegiatan	760.000.000		DISHUB		
Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	Jumlah Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	-	0	1 dokumen	625.770.000	-	0	0	0	0	-	0	1 dokumen	625.770.000	DISHUB		
Pelita Keselamatan Jalan	Jumlah Peserta Pelita Keselamatan di 7 Kabupaten Kota	0	0	500 orang	700.000.000	500 orang	700.000.000	500 orang	700.000.000	500 orang	700.000.000	500 orang	500.000.000	2000 orang	2.600.000.000	DISHUB	
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teledan	Jumlah Peserta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teledan	70 orang	481.268.800	14 orang	87.800.000	14 orang	100.000.000	14 orang	110.000.000	14 orang	125.000.000	14 orang	150.000.000	70 orang	582.800.000	DISHUB	
Penyenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Penyenggaraan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	120 orang	454.799.000	30 orang	110.308.500	30 orang	180.000.000	30 orang	212.750.000	30 orang	244.662.500	30 orang	281.370.000	120 orang	1.034.381.000	DISHUB	
Pembaca Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Jumlah pembaca/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha	2 kab/kota	772.373.134	4 kab/ kota	106.746.000	4 kab/ kota	211.307.800	7 kab/ kota	243.000.000	7 kab/ kota	279.450.000	7 kab/ kota	322.000.000	7 kab/ kota	1.162.503.900	DISHUB	
Pengelolaan Perbaikan Automatic Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pemecangan ATCS	3 kasus	3.000.000.000	0	2 kasus	2.100.000.000	2 kasus	2.300.000.000					4 kasus	4.600.000.000	DISHUB		
Penyenggaraan Pembari Analisa Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pembari Analisa Dampak Lalu Lintas	0	4 dokumen	68.718.000	4 Dokumen	115.000.000	4 Dokumen	132.250.000	4 Dokumen	152.087.500	4 Dokumen	174.800.000	20 Rekomendasi	642.985.500	DISHUB		
Penyenggaraan Manajemen Rekapasi Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekapasi lalu Lintas	0	0	3 dokumen	132.000.000	3 dokumen	151.800.000	3 dokumen	174.570.000	3 dokumen	200.755.500	12 dokumen	669.125.500	DISHUB			
Pengadaan Casing Pengapungan Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Angkutan Umum yang diberikan teknik surut surut kendaraan, Pemecangan Marka dan pengukuran dimensi kendaraan	1.100 unit	454.686.096	600 unit	141.140.000	600 unit	208.660.000	600 unit	208.000.000	600 unit	208.000.000	600 unit	208.000.000	3.000 unit	975.780.000	DISHUB	

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33148
Telp./Fax : (0717) 439279